

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LIMU POLITIK**

**ANALISIS PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP IMIGRAN DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**THESA PRATIKA
NPM : 147310012**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

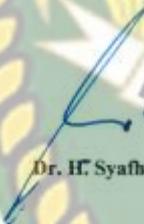
Nama : Thesa Prathika
NPM : 147310012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat
Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan
Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferensial.

Pekanbaru, 30 April 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Syafhendry., M.Si


Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Muliando, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

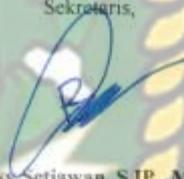
Nama : Thesa Prutika
NPM : 147310012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Sarjana Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 30 April 2019
Sekretaris,

Korja


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota


Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 429 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 12 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal 13 April 2019 jam 10.00 - 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Thesa Pratika
NPM : 147310012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Peranan Kantor imigrasi dalam Melakukan Pengawasan terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.
Nilai Ujian : Angka : "80,2" ; Huruf : "B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca setyo Prihatin, S.IP., M.Si	Ketua	1.
2.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si	Sekretaris	2.
3.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si	Anggota	3.
4.	Dr. H. Syefhendry, M.Si	Anggota	4.
5.	Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si	Anggota	5.
6.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si	Notulen	6.

Pekanbaru, 13 April 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Thesa Pratika
NPM : 147210311
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat
Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan
Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 30 April 2018

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.

Turut Menyetujui
Wakil Dekan I,

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.


Budi Muliando, S.IP., M.Si.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi

dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang

tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku

dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahwas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
2. Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Budi Muliarto, S.IP., M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan semangat, dukungan moril, dan

juga memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Dr. H. Syafhendry., M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si Sebagai Pembimbing II saya yang juga telah dengan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan-arahan kepada saya yang bertujuan untuk penyelesaian Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga, Ayah dan Ibu tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada sahabat saya Yani, Yulia, Devi dan teman seperjuangan saya kelas IP.A yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I A Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Usulan Penelitian ini

untuk kesempurnaan Usulan Penelitian penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 30 April 2019
Penulis

Thesa Pratika



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
1. Tujuan.....	20
2. Kegunaan.....	21
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	22
2. Konsep Organisasi Pemerintahan.....	27
3. Konsep Kebijakan Publik.....	28
4. Konsep Pengawasan.....	30
5. Konsep Peranan.....	37
6. Konsep Imigran dan Imigran Ilegal.....	43
7. Konsep Hubungan Internasional.....	44
B. Penelitian Terdahulu.....	46
C. Kerangka Pikir.....	48
D. Hipotesis.....	49
E. Konsep Operasional.....	49
F. Operasional Variabel.....	53
G. Teknik Pengukuran.....	54
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	57

C. Populasi dan Sampel	58
D. Teknik Penarikan Sampel	58
E. Jenis dan Sumber Data	59
F. Teknik Pengumpulan Data	60
G. Teknik Analisis Data	62
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	63
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	64
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	64
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru	68
3. Pemerintah Kota Pekanbaru	71
B. Sejarah Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru	73
C. Struktur Organisasi Imigrasi Kota Pekanbaru	75
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	76
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	76
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia	77
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	78
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Analisis Peran Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.....	79
1. Menyusun Tujuan.....	80
2. Penetapan Standar	84
3. Pengukuran Hasil Kinerja	88
4. Perbandingan Fakta dengan Standar	91
5. Tindakan Koreksi	95
C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden terkait dengan Penelitian Tentang Analisis Peran Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	98
D. Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Pihak Imigrasi Kota Pekanbaru terkait Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	100
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104

DAFTAR KEPUSTAKAAN	106
DAFTAR LAMPIRAN	108



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Pencari Suaka / Imigran dan juga Pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru Dari Tahun 2015 – 2017.	15
I.2 : Jumlah Keseluruhan Imigran / Pengungsi / Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru Dari Tahun 2015	16
I.3 : Jumlah Keseluruhan Imigran / Pengungsi / Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru Dari Tahun 2016	16
I.4 : Jumlah Keseluruhan Imigran / Pengungsi / Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru Dari Tahun 2017	16
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.	52
III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.	57
III.2 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.	61
IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2013	67
IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2013	68
IV.3 : Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Di Kota Pekanbaru	70
V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai	75
V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai	76
V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pegawai	77
V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai (Menyusun Tujuan)	79
V.5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai (Penetapan	83

Standar)

V.6	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai (Pengukuran Hasil Kinerja)	86
V.7	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai (Perbandingan Fakta dan Standar)	89
V.8	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai (Tindakan Koreksi)	93
V.9	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden terkait penelitian Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	96



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
I	: Kuisisioner Untuk Pegawai dengan judul Penelitian tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	108
2	: Kuisisioner Wawancara Pegawai Penelitian tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	115
3	: Kuisisioner Wawancara Masyarakat Penelitian tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	118
4	: Rekap Telly Penelitian Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru (Pegawai)	120
5	: Dokumentasi Penelitian Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	121
7	: Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	123
8	: Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	124

- 9 : Surat Keterangan Balasan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Kota Pekanbaru 125



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pikir Terkait Dengan Penelitian Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	48
IV.I : Struktur Organisasi Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	73



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thesa Pratika
NPM : 147310012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 April 2019
Pelaku Pernyataan,

Thesa Pratika

ANALISIS PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP IMIGRAN DI KOTA PEKANBARU

Abstrak

Oleh
Thesa Pratika

Kata Kunci : Peranan, Imigran, Pengawasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Peran Kantor Imigrasi dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru. Indikator dari penelitian ini adalah Menyusun Tujuan, Penetapan Standar, Pengukuran Hasil Kinerja, Perbandingan Fakta dengan Standar, dan Tindakan Koreksi. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru ini adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Seksi Status Keimigrasian, Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Pegawai Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru, Masyarakat Kota Pekanbaru yang Tinggal Di Sekitar Rumah Detensi Imigran. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah tehnik sampling jenuh untuk populasi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Seksi Status Keimigrasian, Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Pegawai Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru dan teknik purposive sampling untuk masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru “Cukup Berperan”.

ANALYSIS OF THE ROLE OF IMMIGRANT OFFICES IN CONTROLLING IMMIGRANTS IN KOTA PEKANBARU

Abstract

By
Thesa Pratika

Keywords: *Role, Immigration, Supervision*

This study aims to analyze the extent of the Role of the Immigration Office in Supervising Immigrants in the City of Pekanbaru. The indicators of this study are Arranging Objectives, Determining Standards, Measuring Performance Results, Comparing Facts with Standards, and Actions of Correction. This type of research located in the Pekanbaru Immigration Office I TPI is a descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the research objectives in the studied location. The population used in this study is the Head of Pekanbaru Class I TPI Immigration Office, Immigration Traffic Section, Immigration Status Section, Immigration Monitoring and Enforcement Section, Employees of Pekanbaru City Immigration Office, Pekanbaru City Community Living Around Immigrant Detention Centers. The sampling technique used in determining individual samples is saturated sampling technique for the population of the Head of Pekanbaru Class I TPI Immigration Office, Immigration Section, Immigration Status Section, Immigration Monitoring and Enforcement Section, Pekanbaru City Immigration Office Staff and purposive sampling technique for the community. the types and data collection techniques used in this study consist of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Analysis of the Role of the Immigration Office in Supervising Immigrants in the City of Pekanbaru was "Enough to Play".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak dibidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensial untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi. Herman Finer (dalam Syafiie, 2003;9)

Adapun tujuan dari negara itu sendiri yaitu untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, untuk mencapai kesejahteraan umum, untuk memperluas kekuasaan. Dengan demikian negara adalah suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan, yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa dan pemerintah yang lebih tinggi, selanjutnya rganisasi ini memiliki kewenangan untuk rakyatnya tenteram, aman, teratur, terkendali di satu pihak dan di lain melayani kesejahteraan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional. Dasar pemikiran pemerintahan daerah ini didasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang

merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari : Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan Negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari yang namanya organisasi, organisasi merupakan suatu wadah bagi pemerintah untuk melaksanakan seluruh aktivitas kerjasama yang memanfaatkan sumberdaya yang telah ada dengan menggunakan metode-metode tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang disebut bawahan menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2005; 127).

Dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam sebuah organisasi di butuhkan pula adanya adminitrasi yang baik guna untuk terciptanya good governance. Dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam sebuah organisasi di butuhkan pula adanya adminitrasi yang baik guna untuk terciptanya good governance. Adminitrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial, administrasi

juga sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern, secara eksplisit tergambar administrasi yaitu suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah Urusan Pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara.

Sedangkan yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dibentuknya pemerintah daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

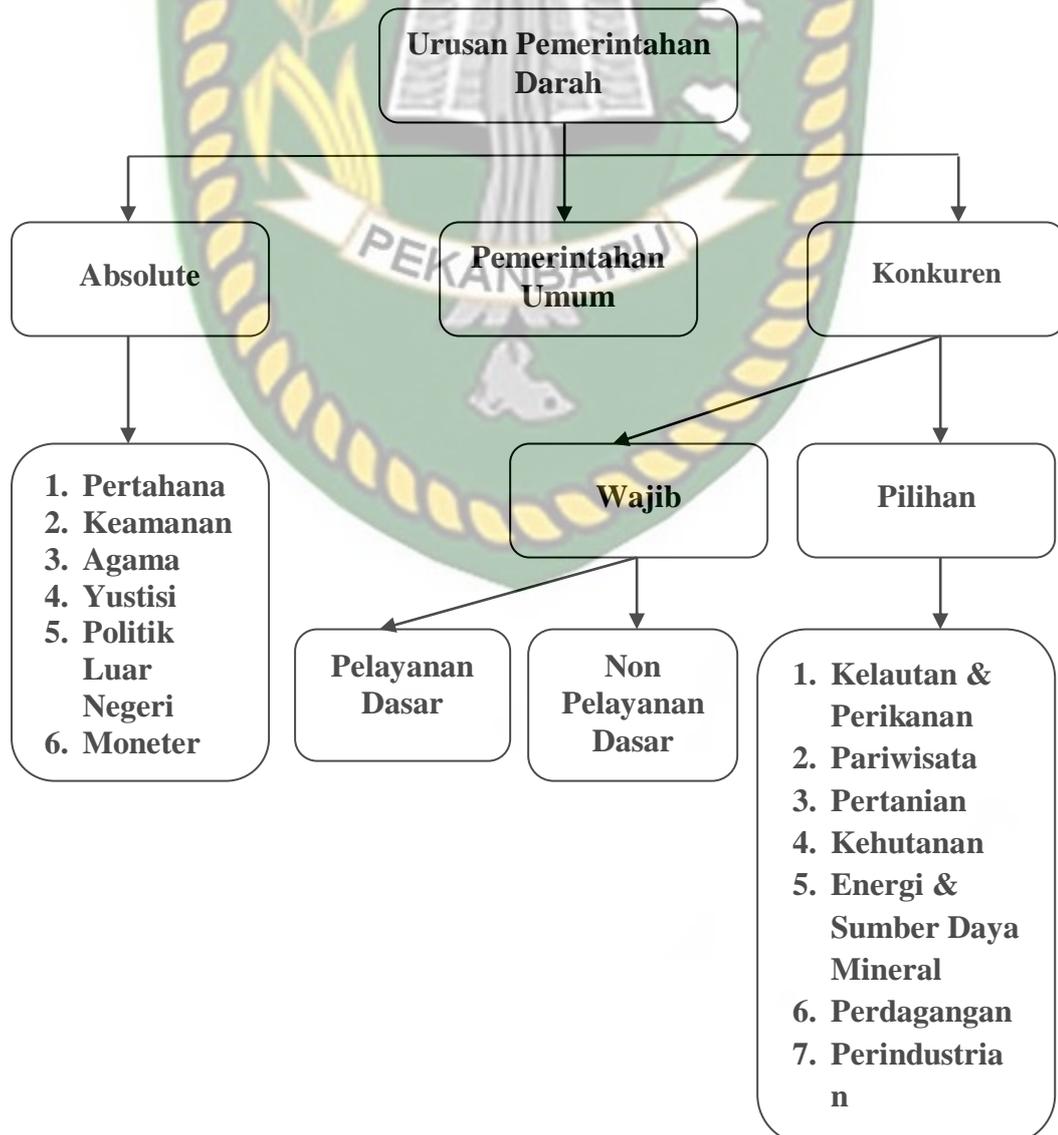
Pada pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekuasaan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Kemudian yang disebut pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia wajib melayangkanya (Ndraha, 2003;7.) Dari penjelasan tersebut di ketahui bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu (1) Fungsi pembangunan, (2) Fungsi Pemberdayaan, (3) Fungsi Pelayanan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Sedangkan urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dan Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum

adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan:



Adapun urusan yang diserahkan pemerintahan pusat kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Pasal 12 yaitu:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Setatistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;

- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Sedangkan urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat atau absolute adalah:

1. Politik luar negeri
Misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga Internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri.
2. Urusan pertahanan
Misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela Negara, bagi setiap warga Negara.
3. Urusan moneter dan fiscal nasional
Misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang.
4. Urusan keamanan
Mendirikan dan membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang melanggar hukum Negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan Negara.
5. Urusan yustisi
Misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesty, dan abolisi, membentuk undang-undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
6. Urusan agama
Misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan.

Jadi dari beberapa urusan pemerintah, yang mengurus bagian keimigrasian adalah urusan pemerintah bagian konkuren. Serta sesuai yang telah diamanatkan

oleh Undang-Undang di atas, pemerintah daerah Kabupaten/kota menjalankan kewenangan-kewenangannya tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten/kota menjalankan kewenangannya dibantu oleh organisasi perangkat daerah, organisasi perangkat daerah diperlukan untuk dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten/kota, disamping itu juga diperlukanya peran serta dan dukungan dari organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan.

Arus globalisasi dan informasi serta perbedaan geografis, iklim, kekayaan alam dan tingkat kemampuan negara-negara yang ada di dunia saat ini, menyebabkan setiap negara saling membutuhkan. Dengan demikian setiap negara dipacu untuk turut aktif dalam pergaulan antar bangsa, jika bangsa itu ingin maju dan tidak terisolasi dari pergaulan internasional. Dunia cenderung terpengaruh pada keterbukaan dan kerja yang saling menguntungkan. Sementara itu teknologi semakin maju, terutama di bidang transportasi dan komunikasi. Saat ini boleh dikatakan sudah tidak ada lagi bagian dunia yang benar-benar terasing dan tidak pernah terjamah oleh orang luar, atau tidak terpengaruh oleh perkembangan yang terjadi disekitarnya.

Kerjasama antar bangsa yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara. Dan Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia,

di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyak terjadi imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, termasuk urusan keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.

Banyaknya akses masuk dan keluar di Negara Indonesia membuat batas-batas serta control dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat di control melalui pintu gerbang yang legal: bandara, pelabuhan, dan stasiun, serta pos perbatasan darat.

Pengawasan untuk perpindahan orang dari dan keluar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh pihak imigrasi. Lembaga keimigrasian yang kemudian menjadi ujung tombak untuk mengawasi hal perpindahan ini, tetapi didalam prakteknya walaupun telah dilakukan pengawasan yang maksimum, namun pihak keimigrasian masih sering luput melakukan pengawasan di dalam beberapa hal.

Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Undang-Undang Keimigrasian merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang tersebut mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan.

Semua aspek keimigrasian juga didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintahan di bidang keimigrasian. Di dalam dasar-dasar pertimbangan UU Keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan UUD 45. Pengaturan keimigrasian ini tertuang dalam UUD 45 Pasal 26 yang memuat Warga Negara dan penduduk, dimana Warga Negara dan penduduk adalah subjek daripada keimigrasian itu sendiri.

Menurut Pasal 1 UU Keimigrasian, “Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama

adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Pengungsi dan pencari suaka kerap kali menjadi topik permasalahan antara Negara Penerima dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Pencari suaka adalah seseorang yang menyebut diri sendirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Pencari suaka yang sedang mencari dan meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi. Untuk menjadikan sebagai status pengungsi, mereka harus melewati berbagai tahap yang dimulai sejak tahap pendaftaran pencari suaka. Asia Tenggara, khususnya Indonesia merupakan tujuan utama untuk disinggahi oleh pengungsi dan pencari suaka sebagai negara untuk meminta perlindungan Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis bagi jalur transportasi laut, berada diantara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik).

Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, maka pemerintah juga tidak bisa langsung menetapkan status para imigran tersebut sebagai pencari suaka atau pengungsi. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR (Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi) yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya penghidupan

para imigran selama di Indonesia di tanggung oleh IOM (International Organization for Migration). Akibatnya, ketika ada sekelompok orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia mereka dikategorikan sebagai imigran gelap yang melakukan pelanggaran administrasi imigrasi sebagaimana di dalam UU Keimigrasian, dan akhirnya dikelompokkan sebagai imigran gelap di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Adapun hak yang diberikan kepada imigran sesuai dengan konvensi wina 1951 dan protokol 1967 sebagai konvensi yang melindungi dan memberikan bantuan pada pengungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi
2. Mengenai status pribadi para pengungsi di atur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili.
3. Seorang pengungsi memiliki hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat mentransfer asetnya ke Negara dimana dia akan menetap.
4. Diakui kebebasan pengungsi untuk berseerikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non-politis. (Pasal 15)
5. Kebebasan untuk berperkara di depan peradilan.
6. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya.
7. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 konvensi:

“Setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di Negara di mana dia ditempatkan”

Sebagai negara transit, Indonesia juga memiliki kelemahan dalam pengawasan dan pengamanan masuknya imigran ilegal. Dalam perkembangannya, kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan imigrasi. Untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi, perlu adanya pengaturan yang memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian.

Globalisasi tidak hanya membawa suatu dampak positif tetapi juga memberikan beberapa dampak negatif bagi suatu negara. Globalisasi secara langsung telah mengaburkan batas-batas wilayah antara negara satu dengan negara yang lain sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan akses untuk melakukan perjalanan ke negara lain.

Indonesia merupakan negara strategis yang terletak di antara dua benua dan dua samudera yaitu benua Asia dan benua Australia serta samudera Hindia dan samudera Pasifik. Letak geografis tersebut menjadi salah satu faktor yang mempermudah akses bagi orang asing untuk berpindah ke negara lain. Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai yang panjang dari sabang sampai merauke yang rentan terjadi kejahatan transnasional termasuk tentang

penyelundupan imigran. Dalam Penjelasan Umum Pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Imigran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melempaki Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

Imigran adalah orang yang mencari tempat tinggal atau suka secara permanen maupun semi permanen. Imigran ini berasal dari negara yang tidak memiliki keamanan yang baik atau negara-negara yang mengalami peperangan dan keacauan sehingga dapat membahayakan dirinya, sehingga hal inilah yang menyebabkan mereka mencari negara yang aman untuk mereka hidup. Tetapi banyak dari mereka yang tidak terdaftar dalam imigrasi atau ilegal.

Kota Pekanbaru akhir-akhir ini menjadi kunjungan lokal yang ramai di kunjungi imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen resmi. migran ilegal tersebut sebagian besar pendatang dari negara yang berkonflik di Timur tengah dan bertujuan mencari suka ke negara– negara maju yang mau menerima imigran ilegal pencari suka tersebut. Organisasi tidak pernah lepas dari administrasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut dengan adanya tujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang digunakan. Demikian juga halnya dengan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sebagai pelaksana pengawasan dan koordinasi memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Untuk memudahkan pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru perlu

melaksanakannya sesuai dengan Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu dengan cara:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam hal ini peran dari pihak Imigrasi Pekanbaru sangat penting dalam menagwasai imigran yang ilegal sehingga mereka tidak bisa bebas masuk ke wilayah khususnya kota Pekanbaru., karena berdasarkan pengamatan penulis, imigran ini sudah melebihi kapasitas tempat penampungan atau rumah detensi imigrasi. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari sosial media bahwa jumlah imigran setiap tahunnya meningkat hingga untuk tahun 2017 ini mencapai hampir 1000 hingga 1.112 orang, sedangkan kapasitas dari rumah detensi imigrasi adalah 120 orang (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/09/13/imigran-di-pekanbaru>).

Jika imigran melebihi kapasitas rumah detensi imigrasi ini pastinya imigran ini membuat tenda-tenda untuk berlindung, dan lebih parahnya lagi, mereka bisa menginap di hotel atau wisma sedangkan jika kita ingi menginap di hotel harus ada identitasnya, dan kita tahu bahwa mereka tidak memiliki identitas otomatisnya ada yang menjamin mereka. Selain itu untuk melangsungkan hidup pastinya mereka membutuhkan biaya, dan untuk mendapatkan itu mereka harus bekerja, kita mengetahui bahwa untuk pribumi Pekanbaru saja susah untuk mendapatkan kerja, apalagi orang asing yang statusnya ilegal, hal ini bisa mengakibatkan mereka bekerja apapun dan menghalalkan segala cara, ini jelasnya

akan membuat dampak negatif secara sosial di kota pekanbaru dan selanjutnya yang menjadi pusat perhatian kita adalah bahwa mereka akan menjadi beban pemerintah khususnya kota pekanbaru, karena kebutuhan mereka di tanggung oleh Pemerintah kota Pekanbaru.

Tetapi di karenakan mereka tidak memiliki identitas ada juga disediakan di luar Rudenim atau termasuk community house yaitu wisma panel Rumbai, wisma Novri di sekitar kampus UIR, Siak Resort di Senapelan. Untuk Interseption ada di Hotel Rina Pasar Bawah, Hotel Satria Jl. Cik Di Tiro, dan wiswa the cops di belakang hotel ratu mayang garden

Dengan penjelasan di atas, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Kantor imigrasi Kelas I TPI adalah pelaksana teknis di bidang ke imigrasian di lingkungan kantor wilayah Departemen Kehakiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah. Kantor imigrasi di pimpin oleh seorang kepala kantor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi departemen kehakiman di bidang imigrasi di wilayah bersangkutan.

Kantor Imigrasi Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis di bidang ke imigrasian di lingkungan kantor wilayah kementrian hukum dan ham provinsi riau, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah kementreian hukum dan ham. Kantor Imigrasi Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi kementrian Hukum dan HAM Riau di bidang ke imigrasian. Sementara itu kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota

Pekanbaru mempunyai Fungsi yang dapat penulis sajikan pada penjelasan yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi imigrasi,
2. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian,
3. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian,
4. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. (Sumber: Kantor Rumah Detensi Kota Pekanbaru)

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil observasi langsung kelapangan, dimana penulis melakukan pengumpulan data awal di Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru, Observasi penulis lakukan pada bulan Februari sampai dengan Bulan April 2018, adapun tujuan pengumpulan data dengan cara melakukan observasi langsung adalah mencari data mengenai jumlah imigran yang ada di kota Pekanbaru dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, data ini penulis dapatkan dari kantor Imigrasi yang berada di jalan KH. Ahmad Dahlan, Pulau Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru. Adapun data yang berhasil penulis kumpulkan adalah berupa data tentang pencarian suaka atau imigran dan juga pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

Tabel I.1: Jumlah Pencari Suaka / Imigran dan juga Pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru Tahun 2015

No	Negara Asal	Jumlah Imigran	Keterangan
1	Afganistan	387	Pengungsi, Pencari Suaka.
2	Irak	74	Pengungsi, Pencari Suaka.
3	Iran	3	Pengungsi, Pencari Suaka.
4	Jordania	1	Pengungsi.
5	Pakistan	16	Pengungsi, Pencari Suaka.
6	Palestina	61	Pengungsi.
7	Somalia	2	Pengungsi, Pencari Suaka.
8	Sudan	4	Pengungsi, Pencari Suaka.

9	Syria	1	Pengungsi.
Jumlah		549	

Sumber : Kantor Rumah Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru 2018

Tabel I.2: Jumlah Pencari Suaka / Imigran dan juga Pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Negara Asal	Jumlah Imigran	Keterangan
1	Afganistan	335	Pengungsi, Pencari Suaka.
2	Irak	30	Pengungsi, Pencari Suaka.
3	Iran	1	Pengungsi, Pencari Suaka.
4	Jordania	4	Pengungsi, Pencari Suaka.
5	Pakistan	5	Pengungsi, Pencari Suaka.
6	Palestina	10	Pengungsi.
7	Sudan	5	Pencari Suaka.
8	Syria	11	Pengungsi, Pencari Suaka.
Jumlah		401	

Sumber : Kantor Rumah Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru 2018

Tabel I.3: Jumlah Pencari Suaka / Imigran dan juga Pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Negara Asal	Jumlah Imigran	Keterangan
1	Afganistan	932	Pengungsi, Pencari Suaka.
2	Banglades	2	Pengungsi, Pencari Suaka.
3	Srilangka	3	Pengungsi, Pencari Suaka.
4	Irak	37	Pengungsi, Pencari Suaka.
5	Iran	20	Pengungsi, Pencari Suaka.
6	Singapore	1	Migrator,
7	Myanmar	40	Pengungsi.
8	Palestine	57	Pengungsi, Pencari Suaka.
9	Somalia	21	Pengungsi, Pencari Suaka.
10	Pakistan	24	-
11	Sudan	40	-
12	Malaysia	1	Imigrator
13	Syria	1	Pengungsi
Jumlah		1.180	

Sumber : Kantor Rumah Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru 2018

Tabel I.4: Jumlah Keseluruhan Imigran / Pengungsi / Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Negara Asal	Jumlah Imigran	Keterangan
1	Afganistan	1.654	Pengungsi, Pencari Suaka.
2	Banglades	2	Pengungsi, Pencari Suaka.
3	Srilangka	3	Pengungsi, Pencari Suaka.
4	Irak	141	Pengungsi, Pencari Suaka.
5	Iran	24	Pengungsi, Pencari Suaka.

6	Singapore	1	Migrator,
7	Myanmar	40	Pengungsi.
8	Palestine	128	Pengungsi, Pencari Suaka.
9	Somalia	23	Pengungsi, Pencari Suaka.
10	Pakistan	45	Pencari Suaka, Pengungsi.
11	Sudan	49	Pencari Suaka.
12	Malaysia	1	Imigrator
13	Syiria	13	Pengungsi.
Jumlah		2.124	

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa keberadaan imigran di kota Pekanbaru dari tahun 2015 hingga tahun 2018 Per Bulan April adalah sebanyak 2.124 Orang, dengan demikian, keberadaan imigran yang ada di kota Pekanbaru terbilang cukup besar, maka diperlukan tindakan pengawasan yang harus diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, hal ini bertujuan untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh imigran-imigran tersebut, dengan demikian masyarakat dapat kepastian keamanan dan tidak perlu merasa khawatir dengan keberadaan imigran di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, dan ditambah dengan data pendukung yang penulis dapatkan dari media-media berita online di daerah Kota Pekanbaru, maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, dan fenomena tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan dan didukung dengan pemberitaan yang ada di Surat Kabar Kota Pekanbaru, Penulis menemukan fakta bahwa banyak imigran yang berkeliaran dengan bebas di kota Pekanbaru tanpa adanya pengawasan atau pemberian

tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru. (<http://www.halloriau.com/read-dprd-pekanbaru-89458-2017-01-25-meresahkan-dewan-minta-imigran-berkeliaran-di-pekanbaru-angkat-kaki.html> Rabu, 25 Januari 2017, Jam 15.20)

2. Penulis menduga bahwa keberadaan imigran yang ada di Kota Pekanbaru sudah melebihi kapasitas tempat penampungan, hal ini di buktikan dengan data yang penulis dapatkan dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru yang menunjukkan bahwa jumlah imigran yang ada di Kota Pekanbaru sampai Bulan April 2018 berjumlah sebanyak 2.124 Orang imigran hal ini tentunya sudah melebihi standar penampungan yang tersedia. (*Data dapat dilihat pada halaman 14*)
3. Berdasarkan hasil pemantauan penulis dilapangan dan juga di dukung dengan data-data yang penulis dapatkan dari surat kabar dan media berita *online* yang ada di Kota Pekanbaru, penulis menemukan dugaan bahwa banyak imigran yang ada dikota pekanbaru menjadi suami simpanan (*Gigolo*) bagi masyarakat Pekanbaru, khususnya bagi perempuan, atau disebut sebagai pekerja *Sex Komersial*. ([http://datariau.com/legislatif/Akhirnya – Terbukti - - Imigran - di-Pekanbaru -Jalin-Asmara-dengan-Wanita-Lokal](http://datariau.com/legislatif/Akhirnya-Terbukti--Imigran-di-Pekanbaru-Jalin-Asmara-dengan-Wanita-Lokal). Minggu 22 Januari 2017, Jam 17.34)

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurangnya peran dari pihak imigrasi kota Pekanbaru dalam memberikan pengawasan terhadap aktivitas imigran ilegal yang bebas berkeliaran kawasan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah: *“Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru”*.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka Imigrasi Kota Pekanbaru merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap imigran ilegal yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah Peran Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap imigran Ilegal di Kota Pekanbaru?”

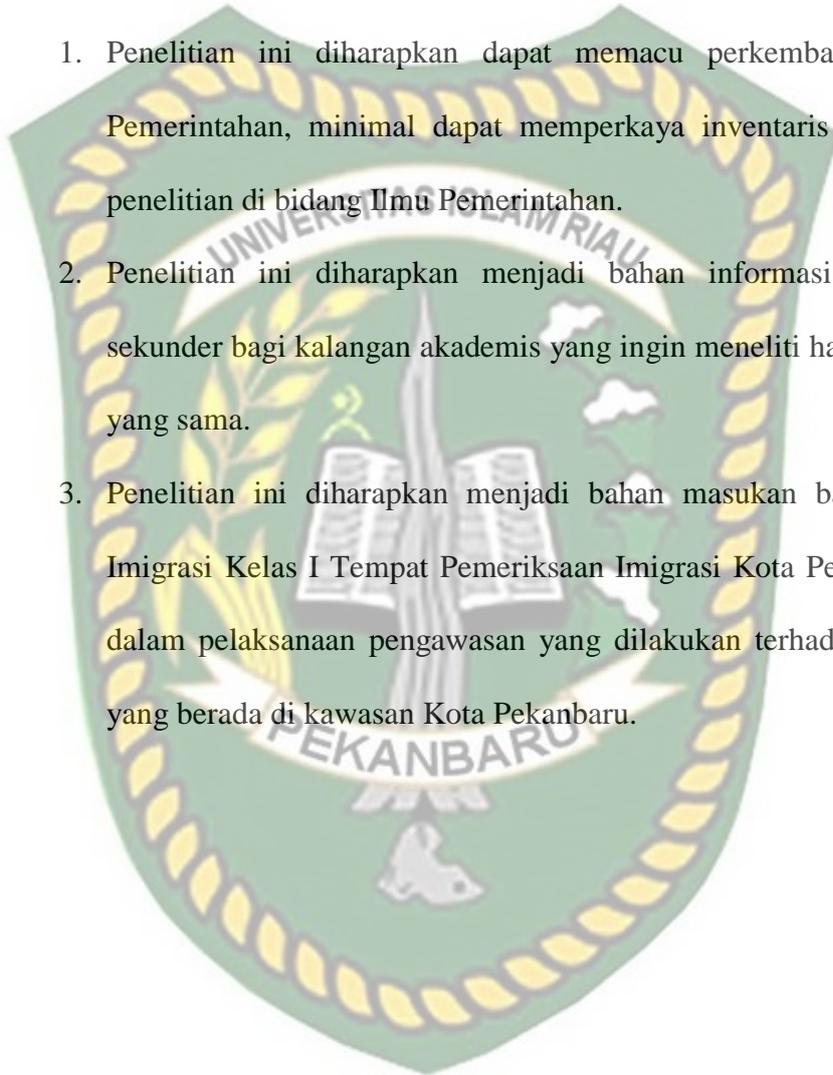
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Peran Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.
 2. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pihak Kantor Imigrasi Kelas

I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru dalam Melakukan Pengawasan terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.

b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru di dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap imigran yang berada di kawasan Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah anatara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintha maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan

administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dan para administrator itu sendiri.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005;133).

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pemberntukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalitas diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selainitu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui sekretaris bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung dibawah bupati/walikota. (Nurcholis, 2005;136)

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2007;14) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Rasyid dalam bukunya juga memaparkan fungsi pemerintahan, yang mana dikatakan fungsi pemerintah adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan

pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid, 2007;32)

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Muhaddam Labolo (2006:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandakan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara.

Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2005 : 11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2005 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Dalam Indihono, 2009:17)

Kemudian menurut Ndraha (2003:43) Kebijakan pemerintahan merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Nurcholis, 2005: 264) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Selanjutnya menurut Mustoadidjadja (dalam Nurcholis 2005: 263) memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Pandangan berbeda di kemukakan oleh Carl Friedrich (dalam Agustino 2014:7) Kebijakan public adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan - kesulitan), dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Menurut Agustino (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apabila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. *Policy demands* atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy decision* atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administrative, atau membuat interpretasi hukum yang penting.
3. *Policy statement* atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang termasuk *policy statement* atau pernyataan kebijakan adalah, ketetapan legislative, dekrit dan perintah eksekutif,peraturan administrative, pendapat pengadilan, dan sebagainya.
4. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan dan pernyataan kebijakan.
5. *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah kensekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

4. Konsep Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian(*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*) menurut Griffin (2004:44). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan,

sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005:317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006:303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan– penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya.

Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan

tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004:61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu menurut Dessler (2009:2), menyatakan bahwa pengawasan (*Controlling*) merupakan penyusunan standar - seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut, Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Menurut Siagian (2003: 30), bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga

perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan.

Sistem pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah fundamental dalam setiap prosesnya (Griffin, 2004: 167). Langkah-langkah tersebut di ilustrasikan dan dijelaskan dalam gambar berikut ini :

Gambar II.1 : Langkah-Langkah Sistem Pengawasan Organisasi (Griffin, 2004:167)



Masing-masing langkah ini di jelaskan sebagai berikut:

a. Menetapkan Standar

Control Standard adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi.

Standar bagi hasil kerja karyawan pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan maupun rencana- rencana bagian. Agar standar itu diketahui secara benar oleh karyawan, maka standar tersebut harus dikemukakan dan dijelaskan kepada karyawan sehingga karyawan akan memahami tujuan yang sebenarnya ingin dicapai.

b. Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinue bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail.

c. Membandingkan Kinerja Dengan Standar

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan (*actual result*) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin maupun laporan khusus. Selain itu atasan dapat juga langsung mengunjungi karyawan untuk menanyakan langsung hasil pekerjaan atau karyawan dipanggil untuk menyampaikan laporannya secara lisan. Kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar. Pada beberapa perusahaan, perbandingan dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan menetapkan standar penjualan produk mereka berada pada urutan pertama di pasar. Standar ini jelas dan relatif mudah dihitung

untuk menentukan apakah standar telah dicapai atau belum. Namun dalam beberapa kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail. Jika kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.

d. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif.

Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnostis manajer. Setelah membandingkan kinerja dengan standar, manajer dapat memilih salah satu tindakan : mempertahankan *status quo* (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan perbaikan, maka harus diketahui apa yang menyebabkan penyimpangan.

Menurut Silalahi (2002;391) pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja aktual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang di capai dengan standart organisasi.

4.1 Teknik Pengawasan.

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah di tetapkan, Siswanto (2008;140) menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar metode untuk pengukuran kinerja.
2. Mengukur Kinerja.
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.
4. Mengambil tindakan perbaikan.

Sedangkan menurut brantas (2009;197) sifat dan waktu pengawasan dibedakan atas;

- a. Preventif control, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- b. Repressive control, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
- c. Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki.
- d. Pengawasan berkala, adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester dan lain-lain.
- e. Pengawasan mendadak (sidak), adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaannya peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.

Pengawasan mendadak ini sekali-kali perlu dilakukan, supaya disiplinkan karyawan tetap terjaga dengan baik.

- f. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara *intergrative* mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

4.2 Efektifitas Pengawasan

Handoko (2009;366) mengatakan ada beberapa factor yang membuat pengawasan semakin diperlakukan oleh setiap organisasi factor-faktor itu adalah:

1. Perubahan lingkungan organisasi. Melalui pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang di ciptakan perubahan perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.
3. Kesalahan-kesalahan. System pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan kesalahan tersebut sebelum menjadi krisis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang. Tanpa system pengawasan, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahannya.

5. Konsep Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha

(2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarperibadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b) Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
 - c) Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

- a) Peran pemantau (Monitor), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :
- 1) Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - 2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (external events), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing- pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.
 - 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
 - 4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
 - 5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang
- b) Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
- c) Sebagai juru bicara (Spokesman), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.

3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.

Keterlibatan ini disebabkan karena:

- a) Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
- b) Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
- c) Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya, (Siswanto 2008 : 21).

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, (Siswanto 2008 : 21).

Menurut pendapat ahli yaitu Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu di antaranya adalah :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :

- a) Cara(Usage); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
- b) Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
- c) Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
- d) Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan di definisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang

menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seorang karena kewajiban dari jabatan atau pekerjaannya. Dalam peran yang berhubungan dengan pekerjaannya seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaannya. Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seseorang camat juga mempunyai peran membina perangkat desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai seorang pemimpin harus mengambil langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang akan diambil dalam membina perangkat kepenghuluan.

6. Konsep Imigran dan Imigran Ilegal

Menurut (*The American Heritage*) pengertian imigran adalah seseorang yang meninggalkan suatu negara untuk bertempat tinggal secara permanen atau menetap ke negara lain “*A person who leaves one country to settle permanently in another*”.vSementara menurut, Oxford Dictionary of Law, imigran diartikan sebagai, “... *is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently.*”

Pengertian tersebut dimaknai bahwa peristiwa imigrasi yang dilakukan oleh para imigran dilihat dari adanya tujuan atau upaya para pelaku migrasi untuk tinggal menetap di negara tujuan. Secara garis besar, berdasarkan pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa imigran adalah individu atau sekelompok

individu yang melakukan perpindahan dari negaranya (wilayahnya) menuju negara (wilayah) lain dengan tujuan tertentu yang mendorong individu melakukan migrasi untuk tinggal menetap di wilayah yang dituju.

Imigran ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, imigran legal dan imigran ilegal. Menurut Hanson (2007:128), Imigran Ilegal diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran ilegal atau imigran ilegal dapat pula diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk menetap di suatu wilayah namun melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa imigran legal adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aktifitas imigrasi dengan membawa dokumen perjalanan yang sah, sementara imigran ilegal adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aktifitas imigrasi namun tidak membawa dokumen perjalanan yang sah ataupun dengan dokumen perjalanan yang sah tetapi dokumen izin tinggal di negara yang dimasuki telah melampaui batas.

7. Konsep Hubungan Internasional

Hubungan Internasional berlangsung sangat dinamis, dimana berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan (alam). Pada awal proses perkembangannya, sejumlah pakar berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Mengutip dari pendapat Schwarzenberger bahwa ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (sociology of international relations). Jadi

ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya (cultural exchange) (Perwita & Yani, 2005 : 1).

Saat ini Hubungan Internasional merupakan cabang atau disiplin ilmu pengetahuan yang paling muda dan sedang berkembang. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005 : 4). Alasan kita mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia hidup dan tinggal didalam negara yang merdeka, secara bersama-sama negara tersebut membentuk sistem negara global (Jackson & Sorensen, 2005:40).

Sedangkan yang menjadi tujuan dasar dari hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, konflik, serta interaksi dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005 : 4).

McClelland dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional juga berpendapat bahwa Hubungan Internasional adalah sebagai

studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia (Perwita & Yani, 2005:4)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dengan penelitian yang terdahulu, dan juga menjadikannya sebagai acuan atau referensi.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait dengan penelitian yang berjudul Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dalam Melakukan Pegawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.

Nama Peneletian	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
Ratna Wilis	Pengawasan dan Penindak Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia (Studi Wilayah Kanor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)	2015	Persamaan dalam penelitian ini adalah dimana proses penelitian berfokus kepada masalah yang sama yaitu terkait dengan keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia.	Perbedaan yang terdapat antara penelitian yang sedang penulis kerjakan dengan penelitian yang menjadi penelitian terdahulu adalah dari segi wilayah dan juga waktu penelitian, dimana penelitian terdahulu berlokasi di daerah Kota Pekan, sedangkan penulis berlokasi di Kota Pekanbaru.

Muharmonth	Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang.	2016	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah melakukan penelitian di kantor imigrasi, dan focus penelitian adalah warga Negara asing yang tinggal di Indonesia.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah, dimana lokasi penelitian ini terletak di Kota Padang, dan focusnya adalah pengawasan terhadap pemberian fasilitas bebas visa dan kunjungan wisata. Sementara itu penulis focus di pengawasan individu masing-masing warga Negara asing yang berkeliaran di kawasan kota Pekanbaru Provinsi Riau.
1	2	3	4	5
Dita Fisdian Adni (Jurnal: Vol. 3 No.2 Oktober 2017)	Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489. UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigrasi Ilegal (Studi di Kantor Imigrasi	2017	penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah melakukan penelitian di kantor imigrasi, dan focus penelitian adalah warga Negara asing yang tinggal di Indonesia	Perbedaan penelitiannya adalah penulis lebih focus meneliti tentang peranan kantor imigrasinya sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi dari Peraturan Direktoral Jenderal Imigrasi No. IMI-1489. UM. 08.05. Tahun 2010

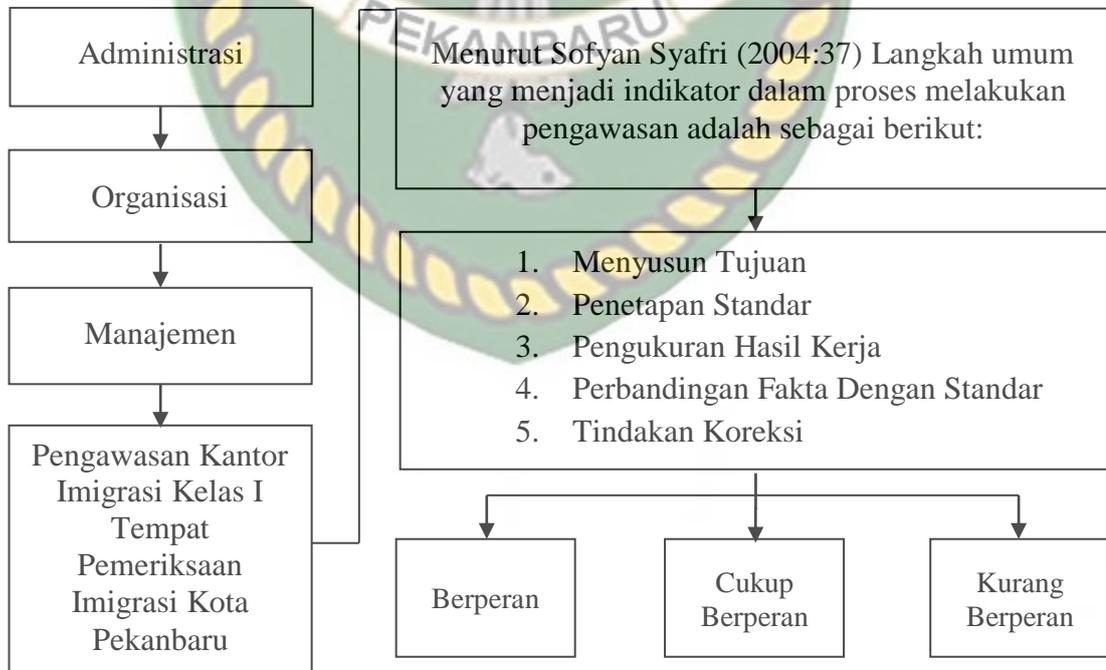
Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesisi.

Kerangka pikir yang peneliti gunakan adalah yang dimulai dari konsep, teori sebagai tolak ukur penelitian, serta hasil yang akan dipaparkan dalam hasil penelitian. Maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut:

Gambar II.2 : Kerangka Pikir Penelitian yang berjudul Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2019

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel tunggal/mandiri. Berdasarkan keterangan dan penjelasan pada gambar kerangka pikir diatas, maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: ***“Diduga Bahwa Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru Belum Berperan”***.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.
2. Konsep Organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

3. Konsep Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan), dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.
4. Konsep Pengawasan Menurut Syafie (2005;112) adalah salah satu fungsi dalam manajemen pemerintahan untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil dan makmur dalam waktu yang sudah ditentukan secara bersama-sama.
5. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

6. Menurut Wikipedia Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang Imigrasi.
7. Indikator dari variable Pengawasan menurut Sofyan Syafri (2004:37) adalah:
 - a. Menyusun Tujuan
Dalam setiap aktivitas pengawasan ada proses yang harus dilalui untuk mengetahui keefektifan dari suatu rencana dan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan itu telah berhasil. Maka harus di susun tujuan terlebih dahulu.
 - b. Penetapan Standar
Karena perencanaan merupakan tolak ukur merancang pengawasan, maka langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Akan tetapi karena perencanaan berbeda dalam perincian dan kerumitannya dan manajer tidak dapat mengawasi segalanya, maka harus ditentukan standar khusus. Misalnya standar tentang prestasi kerja
 - c. Pengukuran Hasil Kinerja.
Langkah selanjutnya dalam pengawasan adalah mengukur dan meng evaluasi prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan, hal ini dimaksudkan agar penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diketahui lebih dahulu
 - d. Perbandingan Fakta Dengan Standar.

Langkah berikutnya adalah membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditentukan. Bila prestasi sesuai dengan standar, manajer akan menilai bahwa segala sesuatunya berada dalam kendali.

e. Tindakan Koreksi.

Proses pengawasan tidak lengkap, jika tidak diambil tindakan untuk membetulkan penyimpangan yang terjadi. Berkaitan dengan proses kontrol ada pertanyaan yang mengganjal, sebenarnya apa yang harus dikontrol? Humble mengatakan tiga macam pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap karya, kemampuan dan gaji. Robbin mengemukakan empat hal yang perlu dikontrol yaitu kualitas, kuantitas, biaya dan waktu. Mitchell mengatakan bahwa kontrol mencakup segala bagian organisasi mulai dari perencanaan, seleksi personalia, pembinaan personalia, anggaran belanja, penilaian perilaku, cara bekerja sampai dengan efektivitas pemakaian dana.

F. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variable Tentang Analisis Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala pengukuran
1	2	3	4	5
<p>Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain system umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran. (Siswanto 2013;139)</p>	<p>Pengawasan</p>	1. Menyusun Tujuan.	<p>a. Penyusunan program Kerja terkait pengawasan Imigran.</p> <p>b. Pembentukan Tim Kerja Terkait Pengawasan Imigran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berperan ▪ Cukup Berperan ▪ Kurang Berperan
		2. Penetapan Standar	<p>a. Penetapan SOP Kegiatan Pengawasan.</p> <p>b. Penetapan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berperan ▪ Cukup Berperan ▪ Kurang Berperan
		3. Pengukuran Hasil Kerja	<p>a. Pelaksanaan Pengawasan Dilapangan.</p> <p>b. Pelaksanaan Tindakan Sidak Terkait Identitas Imigran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berperan ▪ Cukup Berperan ▪ Kurang Berperan
		4. Perbandingan Fakta Dengan Standar.	<p>a. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Imigran.</p> <p>b. Melakukan Pendataan Terhadap Jumlah Imigran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berperan ▪ Cukup Berperan ▪ Kurang Berperan
		5. Tindakan Koreksi	<p>a. Pelaksanaan Pemberian Sanksi Kepada Imigran.</p> <p>b. Pelaksanaan tindakan Evaluasi Terkait Kinerja Tim Pengawas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berperan ▪ Cukup Berperan ▪ Kurang Berperan

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019.

G. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru Mencapai Persentase 67%-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru Mencapai Persentase 34%-100%

Kurang Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru Mencapai Persentase 33%-100%

a) Menyusun Tujuan.

Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Menyusun Tujuan berada pada skala 67% - 100%.

Cukup Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Menyusun Tujuan berada pada skala 34% - 66%.

Kurang Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Menyusun Tujuan berada pada skala 1% - 33%.

b) Penetapan Standar.

Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penetapan Standar berada pada skala 67% - 100%.

Cukup Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penetapan Standar berada pada skala 34% - 66%.

Kurang Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penetapan Standar berada pada skala 1% - 33%.

c) Pengukuran Hasil Kinerja

Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengukuran Hasil Kinerja berada pada skala 67% - 100%.

Cukup Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengukuran Hasil Kinerja berada pada skala 34% - 66%.

Kurang Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengukuran Hasil Kinerja berada pada skala 1% - 33%.

d) Perbandingan Fakta Dengan Standar.

Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perbandingan Fakta Dengan Standar berada pada skala 67% - 100%.

Cukup Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perbandingan Fakta Dengan Standar berada pada skala 34% - 66%.

Kurang Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perbandingan Fakta Dengan Standar berada pada skala 1% - 33%.

e) **Tindakan Koreksi.**

Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Tindakan Koreksi berada pada skala 67% - 100%.

Cukup Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Tindakan Koreksi berada pada skala 34% - 66%.

Kurang Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Tindakan Koreksi berada pada skala 1% - 33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang melibatkan data kuantitatif dan kualitatif, penggabungan dua bentuk data, dan penggunaan rancangan berbeda, yang dapat melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan kerangka kerja teoritis. Asumsi inti dari penelitian bentuk ini adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang memberikan pemahaman lebih lengkap daripada hanya satu pendekatan saja dalam perumusan masalah penelitian. (Creswell, 2017, hlm. 6). Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan semua fakta yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dimana permasalahan yang akan diteliti adalah Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti, maka peneliti ini akan dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru adalah dikarenakan berdasarkan fenomena dilapangan yang penulis temui, dimana masih banyak imigran yang dengan bebas beraktivitas di Kota Pekanbaru tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota

Pekanbaru. Hal ini tentunya sudah tidak sesuai dengan undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu pengawasan terhadap orang asing.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah bentuk yang berbeda namun didalam hal ini yang membedakannya adalah, populasi adalah wilayah generalisasi atas obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneli untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono,2010:91). Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010:91). Untuk lebih jelasnya pengambilan sampel dari populasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 : Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.

No	Responden	Populasi	Sampel	Persen
1	Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru. Oki Derajat Rizki Mubarok.	1	1	100 %
2	Pegawai Dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru.	45	5	11 %
3	Ketua RT 03 RW 01. Kelurahan Simpang Tiga Kec. Bukit Raya. Pak RT Herik Kasro	1	1	100%
Jumlah		47	7	15%

Sumber : Modifikasi penulis 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, dan Perwakilan Masyarakat yaitu Ketua RT 01, Bapak Herik Kasro. Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Digunakan Teknik Penarikan Sampel dengan jenis *Teknik Sensus* dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti.
2. Sementara untuk sampel Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru digunakan *Teknik Purposive Sampling* Dimana Teknik ini dilakukan dengan cara dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dimana ciri-ciri dari penentuan sampel untuk pegawai adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang dipilih adalah pegawai yang menangani bidang pengawasan Imigrasi di Kota Pekanbaru.
 - b. Pegawai yang bekerja sebagai pegawai tetap.
 - c. Memiliki Pengetahuan tentang prosedur imigrasi di Kota Pekanbaru.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari responden, yang meliputi hasil kuisioner yang berkenaan dengan Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru serta interview dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru, dan juga pegawai yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh seperti:
 - a. Identitas responden;
 - b. Tanggapan responden tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru
2. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.
 - a. Sejarah singkat Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru
 - b. Keadaan geografis lokasi penelitian
 - c. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Teknik Interview (wawancara) yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada.

Teknik didasarkan mampu memberikan informasi yang berkompeten karena langsung dari sumber yang dapat dipercaya. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan key informan penulis yaitu, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru yaitu Oki Derajat Rizki Mubarak, serta sampel dari masyarakat yaitu Pak RT Herik Kasro dari RT/RW 03/01. Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya.

- b. Teknik kuesioner yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa Responden Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, serta penulis meminta penjelasan dari setiap pertanyaan yang ada. Dalam penelitian ini, responden yang diberikan kuesioner adalah pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru. Para pegawai diberikan pertanyaan sesuai dengan indikator variabel penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang hadir dan berada di kantor berjumlah 45 orang, dari jumlah pegawai tersebut, maka penulis melakukan pengumpulan data dari pegawai yang memiliki kategori dan kapasitas untuk memberikan jawaban kepada penulis tentang masalah penelitian yang mengangkat tentang pengawasan terhadap imigran (Orang Asing Pencari Suaka) di Kota

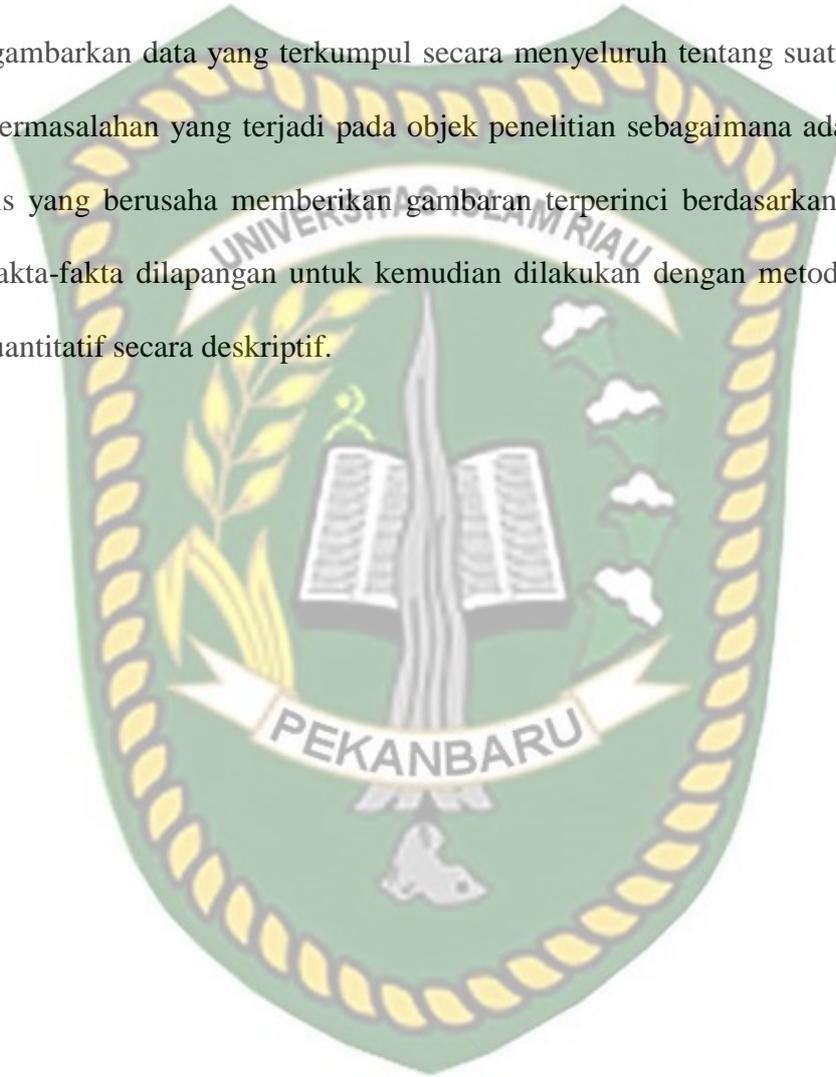
Pekanbaru, dan jumlah responden yang penulis mintai keterangan adalah sebanyak 5 orang responden.

- c. Teknik Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi ataupun mengamati permasalahan di lapangan, sesuai dengan fenomena yang penulis angkat, setelah itu penulis membandingkan antara hasil observasi peneliti di lapangan dengan tanggapan pegawai kantor Imigrasi yang merupakan sampel dalam penelitian penulis. Hal-hal yang menjadi perhatian penulis dalam melakukan observasi adalah keberadaan para imigran yang beraktivitas dengan bebas di Kota Pekanbaru, baik itu di tempat umum maupun di tempat-tempat lainnya.
- d. Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain-lain. Dokumentasi yang penulis dapatkan dari Kantor Imigrasi adalah struktur organisasi, data-data tentang imigran, dokumentasi foto, serta dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan keberadaan imigran (orang asing) di Kota Pekanbaru.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam

bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian di analisis dengan metode Deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya, suatu analisis yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta di lapangan untuk kemudian dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif secara deskriptif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mart			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Ujian Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Kuisisioner																								
5	Rekomendasi survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengandaan Skripsi																								

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7

September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat

Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- 1) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- 2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- 4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
- 5) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- 7) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- 9) UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- 10) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah

menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar di musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2013.

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
Jumlah		458.059	446.020	887.438

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2013

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
Jumlah		190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	2	3	
1.	Kecamatan Tampan	Simpang baru Sidomulyo barat	Tuah karya Delima
2.	Kecamatan Payung Sekaki	Labuh Baru Timur Tampan/	Air hitam Labuh baru barat
3.	Kecamatan Bukit Raya	Simpang tiga Tangkerang Selatan	Tangkerang Utara Tangkerang Labuai

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
4.	Kecamatan Marpoyan Damai	Tangerang Tengah Tangerang Barat	Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo
5.	Kecamatan Tenayan Raya	Kulim Tangerang Timur	Rejosari Sail
6.	Kecamatan Sail	Cita Raja Suka Maju Suka Mulia	
7.	Kecamatan Lima Puluh	Rintis Sekip	Tanjung Rhu Pesisir
8.	Kecamatan Pekanbaru Kota	Simpang empat Sumahilang Tanah Datar	Kota Baru Suka Ramai Kota Tinggi
9.	Kecamatan Senapelan	Padang Bulan Padang Terubuk Sago	Kampung dalam Kampung Bandar Kampung Baru
10.	Kecamatan Sukajadi	Jatirejo Kampung tengah Kampung melayu	Kendungsari Harjosari Sukajadi Pulau koran
11.	Kecamatan Rumbai	Limbunsari Muara fajar	Rumbai bukit Palas Sri meranti
12.	Kecamatan Rumbai Pesisir	Meranti Pandek Limbungan Lembah sari	Lembah damai Limbungan baru Tebing tinggi okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2016

B. Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru.

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang disingkat dengan Kanim Pekanbaru mempunyai wilayah kerja Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-02.PR.07.04 Tanggal 10 Maret 1983 dan mempunyai Pos-Pos di Pelabuhan Udara Simpang Tiga dan di Pasar Bawah Pekanbaru. Selain itu juga terdapat Pos di Siak Sri Indrapura yang termasuk kedalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Riau Nomor W4-PW.01.07- 5.2694
Tanggal 12 November 1986. Perihal kemudahan pengurusan dan penyelesaian
perizinan keimigrasian bagi tenaga kerja yang dipekerjakan dalam wilayah kerja
Kantor Imigrasi Bengkalis, hal ini mengingat :

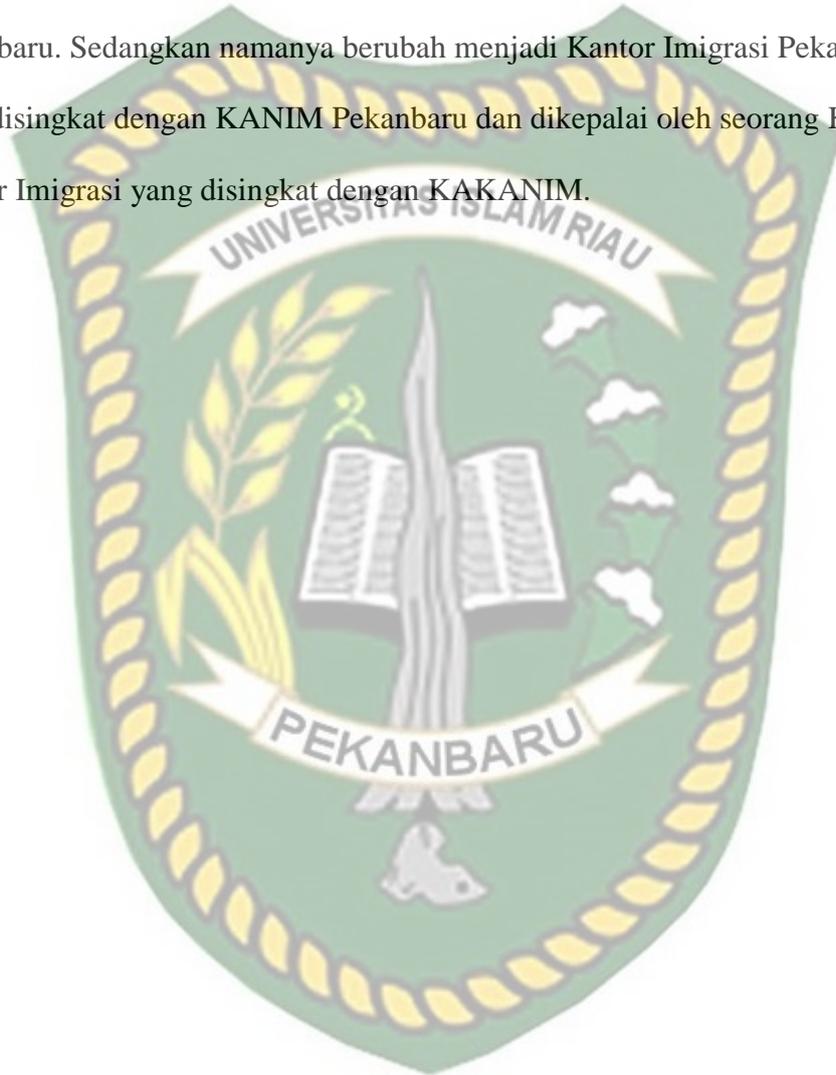
1. Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja/ahli Orang Asing tersebut berpusat di Pekanbaru.
2. Timbulnya biaya yang tinggi serta efisiensi tugas pelayanan keimigrasian.
3. Sementara Kantor Imigrasi Bengkalis belum siap dengan personel dan sarana penunjang operasional lainnya.

Pada awalnya Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru sudah ada sejak zaman Belanda sekitar tahun 1959-an. Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru pada waktu itu bernama Jawatan Imigrasi Pekanbaru yang berkedudukan di tepian Sungai Siak jalan Pelabuhan Pekanbaru. Kemudian sekitar tahun 1960-an Jawatan ini diubah menjadi Kantor Wilayah Inspektorat Jenderal setelah itu sekitar tahun 1970-an bernama Kantor Daerah Imigrasi Pekanbaru (KANDIM).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.S.4/8/10 Tanggal 28 Juli 1976 Kantor Daerah Imigrasi Pekanbaru dihapus dan diintegrasikan ke dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau/Sumbar, sehingga kedudukan yang semulanya di Jalan Teratai dipindahkan ke jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru tepatnya di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tertanggal 01 April 1982 terjadi lagi pengintegrasian. Dimana yang dulunya bernama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau dan Sumatera

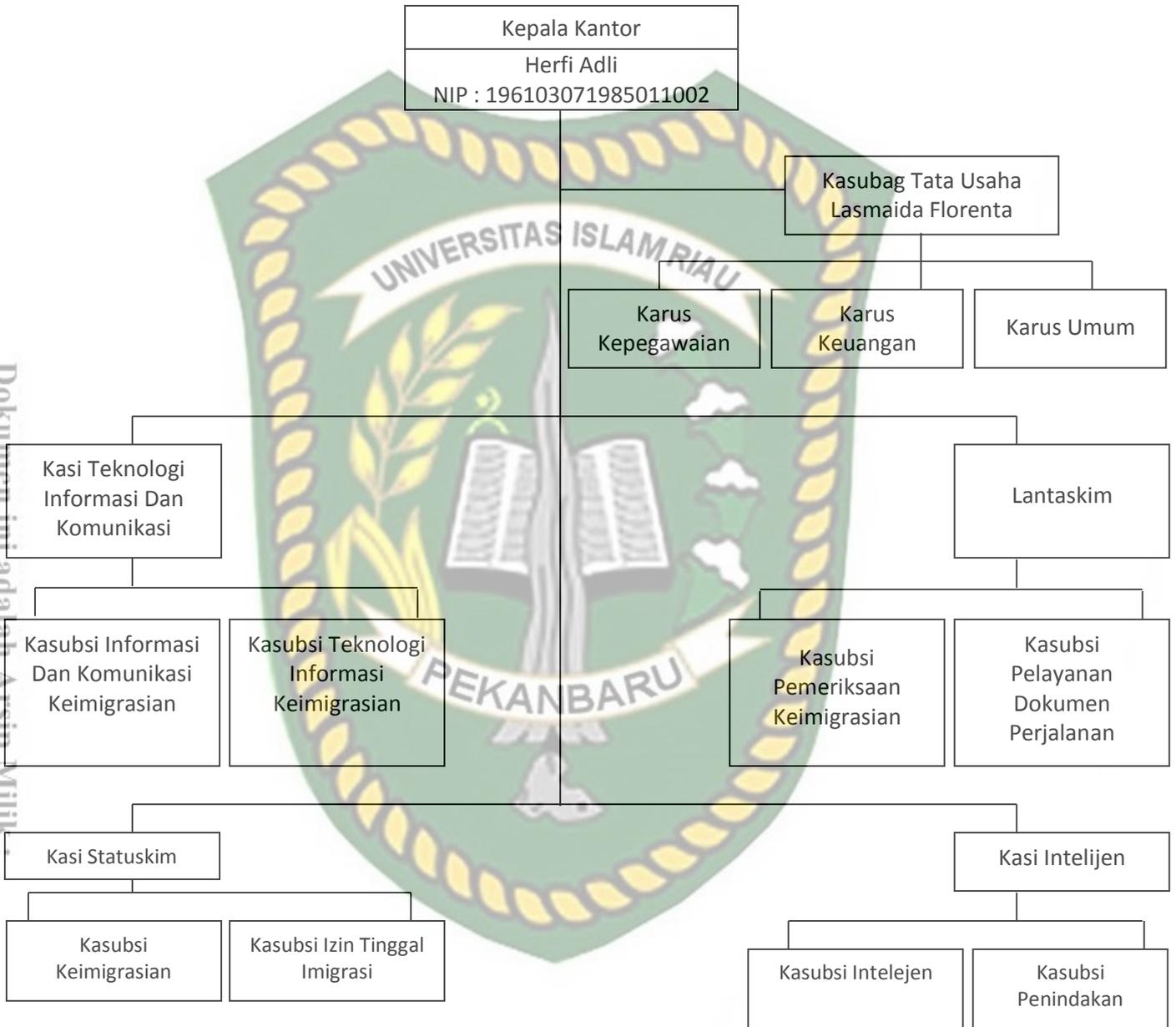
Barat, diintegrasikan ke dalam Kantor Daerah Imigrasi yang disatukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau Sumbar, dipisahkan dan pindahkan kembali ke Jalan Teratai atau tepatnya Simpang K.H Ahmad Dahlan Pekanbaru. Sedangkan namanya berubah menjadi Kantor Imigrasi Pekanbaru yang disingkat dengan KANIM Pekanbaru dan dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Imigrasi yang disingkat dengan KAKANIM.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru.



Sumber : Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru 2019

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Analisis Peranana Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, dan Masyarakat Kota Pekanbaru yang Tinggal Disekitar Rumah Detensi Imigran serta melakukan penyebaran kuesioner kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru sebanyak 5 orang sampel.

Sehubungan dengan penelitian Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru, diperlukannya data ataupun identitas responden, maka berikut akan di paparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan golongan.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian tentang Analisis Peranana Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru, selain melakukan wawancara juga digunakan dengan cara penyebaran kuesioner, oleh karena itu sangat di perlukan penulis mengetahui identitas Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru.

Untuk pertama yang perlu di ketahui dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang akan di paparkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Pegawai Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian membahas tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 3 orang dengan persentase (60%) dari Total keseluruhan responden mencapai 5 Orang responden, dan jumlah responden perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase (40%) dari total keseluruhan 5 Orang responden Pegawai.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden penelitian yang kedua yang ingin penulis ingin ketahui adalah dari segi usia pada Pegawai yang menjadi responden, karena usia sangat ditentukan dalam kematangan dalam menilai, dan tentunya usia yang dipilih adalah Pegawai yang memiliki pemikiran yang sehat dan sudah

memiliki keputusan dalam hidupnya. Untuk melihat latar belakang usia responden, penulis memberikan interval angka untuk mempermudah peneliti. Berikut tabel berdasarkan latar belakang usia masyarakat yang di jadikan responden:

Tabel V.2: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	0	0%
2	31-40 Tahun	4	90%
3	41-50 Tahun	1	10%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Dari tabel V.2 diatas dinyatakan bahwa responden dari Pegawai Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru dominan memiliki usia dari interval 31-40 Tahun yaitu berjumlah 4 orang dengan persentase (90%), selanjutnya usia 20-30 Tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 10%), dan yang paling minim dari total keseluruhan jumlah sampel 5 orang.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisisioner, maka identitas responden Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan latar belakang

jenjang pendidikan, karena pendidikan sangat menentukan pengalaman dan cara pandang dalam menyikapi dalam suatu masalah. Pegawai yang memiliki pendidikan yang cukup baik akan mudah dan cepat tanggap dalam memberikan pendapat dan tentunya cara penyampaiannya atau komunikasi akan berbeda dengan Pegawai yang kurang baik pendidikannya. Berikut penulis akan paparkan dalam bentuk Tabel:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pegawai

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	0	0%
4	Diploma	0	0%
5	Sarjana S1/S2	5	100%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden masyarakat yang ada disekitar pabrik karet dominan memiliki pendidikan Sarjana (S1/S2) yaitu berjumlah 5 responden dengan persentase (100%), dari total keseluruhan pegawai berjumlah 5 orang responden.

B. Hasil dan Pembahasan Mengenai indikator Variabel Analisis Peranan Kantor Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Kota Pekanbaru

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud

yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Jadi observasi dapat diartikan sebagai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada di lapangan untuk dijadikan sebagai data konkrit dan disusun dalam bentuk tabel dan diuraikan di dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur seperti indikator. Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian Analisis Peranana Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru yaitu: Menyusun Tujuan, Penetapan Standar, Pengukuran Hasil Kinerja, Perbandingan Fakta dan Standar, Tindakan Koreksi. Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu *Menyusun Tujuan*, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut ini:

1. Menyusun Tujuan

Dalam setiap aktivitas pengawasan ada proses yang harus dilalui untuk mengetahui keefektifan dari suatu rencana dan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan itu telah berhasil. Maka harus di susun tujuan terlebih dahulu. Jadi pihak Imigrasi melakukan tujuan dari pengawasan harus menyusun strategi terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Penyusunan pengawasan dapat dilakukan dimulai dari menyusun tim untuk melakukan pengawasan di lapangan, menyusun tindakan-tindakan yang akan di lakukan dalam pengawasan, menyusun program-program khususnya dalam pengawasan. Hal ini bertujuan untuk

mempermudah pihak Imigrasi dalam megawasi dan mengamankan jika para Imigran tidak mematuhi aturan yang berlaku ataupun Imigran yang tidak memenuhi persyaratan yang masuk ke dalam Kota Pekanbaru khususnya.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang pertama yaitu tentang komunikasi maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Menyusun Tujuan.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Penyusunan program kerja terkait pengawasan Imigran	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	5 (100%)
2	Pembentukan tim kerja terkait pengawasan imigran	1 (20%)	4 (80%)	0 (00%)	5 (100%)
3	Kegiatan yang disusun bertujuan untuk melakukan pengawasan imigran	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
Jumlah		8	7	0	15
Rata-Rata		3	2	0	5
Persentase		60%	40%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.4 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “Menyusun Tujuan” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Berperan” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 3 Orang responden

dengan persentase (60%), hal ini dikarenakan pegawai Imigrasi menilai bahwa mereka sudah menyusun program serta pembentukan tim kerja, dan kegiatan-kegiatan tersebut disusun bertujuan untuk melakukan pengawasan imigran.

Selanjutnya jawaban responden peserta pada kategori “Cukup Berperan” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 2 Orang responden peserta dengan persentase (40%). Alasan mereka memberikan jawaban cukup berperan ini adalah karena sebagian pegawai yang dijadikan sampel menyatakan memang sudah disusun program serta kegiatan-kegiatan dalam melakukan pengawasan ini tetapi tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Sedangkan tanggapan pada kategori “Tidak Berperan” tidak ada responden yang memberikan jawaban atau pilihan terhadap jawaban ini, dengan demikian maka masing-masing jawaban yang telah di dapatkan pada item penilaiannya telah disajikan dan selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk penyajian wawancara yang penulis lakukan dengan informan, dimana jawaban ini tentunya berguna sebagai perbandingan jawaban yang telah di dapatkan di atas sebelumnya.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas, dimana prosesnya melalui penyebaran kuesioner terhadap pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, selain dari sajian hasil penyebaran kuesioner di atas, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Oki Derajat Rizki Mubarok, yang menjabat selaku Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara

ini bertujuan untuk membuktikan ke akuratan data yang di dapatkan guna menyempurnakan penelitian penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan masing-masing item penilaiannya, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Tentunya kita menjalankan pekerjaan sesuai dengan program-program yang telah di rencanakan dan di susun di setiap periode kerjanya, salah satu yang menjadi ranah pekerjaan kita memang benar untuk melakukan pengawasan terhadap pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru ini, dimana memang banyak isu-isu yang beredar di masyarakat tentang keberadaan imigran tersebut, dan itu kita masukin ke dalam perencanaan program kerja” (Wawancara tanggal 08 Januari 2019, Oki Derajat Rizki Mubarak, Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru)

Pembentukan program tentunya membutuhkan tim untuk menjalankan program-program yang telah di susun tersebut, dan untuk mengetahui apakah di dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru memiliki TIM atau tidak, maka penulis akan menyajikan pernyataan wawancara yang di berikan oleh Oki Derajat Rizki Mubarak, dimana wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Setiap divisi atau bidang pastinya memiliki tim kerjanya masing-masing, begitu juga saya, dalam menjalankan sebuah misi, pastinya di bentuk beberapa tim yang terdiri dari beberapa orang, nantinya tim itulah yang bertanggung jawab untuk proses dan penyelesaian tugas tersebut” (Wawancara tanggal 08 Januari 2019, Oki Derajat Rizki Mubarak, Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru)

Berdasarkan pembahasan yang telah di dapatkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pihak Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang penulis tanyakan, dimana proses pembentukan dan penyusunan program serta pembentukan tim sudah terlaksana berdasarkan pengakuan dari Oki Derajat Rizki Mubarak, yang menjabat selaku

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru memang berdasarkan pekerjaan tim, dimana tim yang di bentuk terdiri dari beberapa orang yang di pimpin langsung oleh Oki Derajat Rizki Mubarak, dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, penulis tentunya berharap agar keberadaan imigran yang bebas beraktivitas di beberapa lokasi di pekanbaru dapat di kontrol aktivitasnya, hal ini tentunya bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman masyarakat lokal yang ada di Kota Pekanbaru itu sendiri.

2. Penetapan Standar

Penetapan standar ini merupakan tolak ukur merancang pengawsan, maka langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Akan tetapi karena perencanaan berbeda dalam perincian dan kerumitannya dan manajer tidak dapat mengawasi segalanya, maka harus ditentukan standar khusus. Misalnya standar tentang prestasi kerja. Standar yang dimaksud adalah kebijakan dalam melakukan pengawasan imigran dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengawasan Keimigrasian adalah sebagai berikut:

1. Petugas mengumpulkan bahan keterangan melalui (SIMKIM, Laporan hasil penyediaan Intelkim, Laporan/pengaduan masyarakat, Media cetak/ elektornik/ sosial, Instansi terkait, Sumber informasi lainnya.

2. Direktur Wasdakim/Kakanim memerintahkan Kasubdit/Kabid/Kasi/Kasubi melaksanakan rapat persiapan pengawasan keimigrasian yang menghasilkan. (jumlah personil, alat komunikasi, alat transportasi, anggaran, jangka waktu sprint, waktu pelaksanaan pengawasan, *sofe house*)
3. Direktur Wasdakim/Kakanim Menertibkan Sprint (identitas petugas, jangka waktu, sasaran, tugas, anggaran.
4. Petugas melakukan pengawasan (memperlihatkan sprint dan identitas pegawai, memeriksa keberadaan orang asing, meminta orang asing memperlihatkan dokumen keimigrasian, melakukan wawancara dan memeriksa kesesuaian kegiatan asing dengan izin tinggalnya)
5. Petugas mengisi formulir hasil wawancara pengawasan keimigrasian hasil wawancara pengawasan keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan (formulir hasil wawancara).
6. Petugas menyusun laporan, pelaksanaan operasi pengawasan keimigrasian.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang kedua yaitu tentang penetapan standar maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Penetapan Standar

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Penetapan SOP Kegiatan Pengawasan	5 (100%)	0 (60%)	0 (0%)	5 (100%)
2	Penetapan waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan	1 (20%)	4 (80%)	0 (0%)	5 (100%)

3	Tim yang sudah dibentuk sudah mencukupi melakukan pengawasan dalam	1 (20%)	4 (80%)	0 (0%)	5 (100%)
Jumlah		7	8	0	15
Rata-Rata		2	3	0	5
Persentase		40%	60%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.5 di atas dapat dilihat bahwa jawaban terhadap indikator kedua yang membahas tentang “Penetapan Standar” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Berperan” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 2 Orang responden dengan persentase (40%), hal ini dikarenakan pegawai Imigrasi menilai bahwa mereka penetapan Standar SOP dalam melakukan pengawasan Imigran sudah ada dan terlaksana walaupun masih ada kekurangan dalam melakukan kegiatannya di lapangan. Selanjutnya jawaban responden peserta pada kategori “Cukup Berperan” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 3 Orang responden peserta dengan persentase (60%). Dan yang terakhir adalah jawaban yang di ikuti oleh responden pegawai yaitu jawaban pada kategori “Tidak Berperan” dimana tidak ada responden yang memberikan jawaban atau pilihan mereka pada kategori jawaban yang terakhir tersebut.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas, dimana prosesnya melalui penyebaran kuesioner terhadap pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, selain dari sajian hasil penyebaran kuesioner di atas, maka penulis juga akan menyajikan hasil

wawancara penulis dengan informan yaitu Oki Derajat Rizki Mubarak, yang menjabat selaku Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk membuktikan ke akuratan data yang di dapatkan guna menyempurnakan penelitian penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan masing-masing item penilaian yang ada seperti “Penetapan SOP dan Penetapan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Dalam menjalankan sebuah program, tentunya harus memiliki standar operasionalnya, terutama tugas yang di laksanakan dilapangan, harus ada SOP yang mengatur agar tindakan-tindakan yang di jalankan tidak menyalahi aturan baik itu aturan dimasyarakat ataupun aturan perundang-undangan,” (Wawancara tanggal 08 Januari 2019, Oki Derajat Rizki Mubarak, Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru)

Dalam pelaksanaannya, tentunya harus di atur terkait dengan waktu yang akan di tentukan untuk melakukan pengawasan tersebut, dan untuk mengetahui apakah penentuan waktu pengawasan telah di lakukan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk wawancara di bawah ini:

“Jadwal pengawasan tentunya ada, dan pengawasan yang dimaksud di sini bermacam-macam, ada pengawasan terhadap aktivitas dilapangannya, dan ada juga pengawasan untuk pengecekan ke masing-masing rumah detensi nya, ada juga pengawasan bersifat data dan aktivitas mereka terhadap Negara luar, seperti pemberian informasi dan lain-lainnya, hal ini tentunya untuk megantisipasi adanya penyalah gunaan status mereka sendiri,” (Wawancara tanggal 08 Januari 2019, Oki Derajat Rizki Mubarak, Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru)

Berdasarkan hasil obsevasi yang telah lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses pengawasan memang sudah di jadwalkan oleh

pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, tetapi yang menjadi permasalahan dilapangan adalah proses pengawasan yang belum terlaksana dengan maksimal, hal ini di buktikan dengan masih bebas nya para imigran beraktivitas tanpa adanya tanda pengenalan diri mereka dan bahkan dapat memanfaatkan fasilitas umum dengan bebas layaknya masyarakat lokal. Hal ini tentunya cepat atau lambat akan menimbulkan permasalahan sosial di tengah masyarakat, yang mana dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dimasyarakat, dan dari beberapa isu yang beredar dimasyarakat ditemukan imigran yang bekerja sebagai “suami simpanan” oleh masyarakat kota Pekanbaru.

3. Pengukuran Hasil Kinerja

Langkah selanjutnya dalam pengawasan adalah mengukur dan meng evaluasi prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan, hal ini dimaksudkan agar penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diketahui lebih dahulu. Jadi setelah dilaksanakannya pengawasan di lapangan maka yang perlu dilakukan adalah mengukur hasil kinerja pengawasan setelah pengawasan tersebut sudah dilakukan di lapangan. Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang ketiga yaitu tentang pengukuran hasil kinerja maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Pengukuran Hasil Kinerja

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	

1	Pelaksanaan pengawasan di lapangan	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	5 (100%)
2	Pelaksanaan tindakan sidak terkait identitas Imigran	1 (20%)	4 (80%)	0 (0%)	5 (100%)
3	Dampak setelah dilakukannya pengawasan	1 (20%)	4 (80%)	0 (0%)	5 (100%)
Jumlah		4	11	0	15
Rata-Rata		1	4	0	5
Persentase		20%	80%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.6 di atas dapat dilihat bahwa jawaban terhadap indikator ketiga yang membahas tentang “Pengukuran Hasil Kinerja” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Berperan” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 1 Orang responden dengan persentase (20%), hal ini dikarenakan pegawai Imigrasi menilai bahwa mereka sudah melakukan pengawasan dan pernah melakukan tindakan sidak terkait identitas para imigran di Kota Pekanbaru.

Jawaban selanjutnya adalah jawaban dengan kategori “Cukup Berperan” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan terhadap jawaban ini adalah dengan rata-rata sebanyak 4 Orang responden peserta dengan persentase (80%). Adapun alasan yang mereka berikan terkait dengan jawaban cukup berperan ini adalah karena sebagian pegawai yang dijadikan sampel menyatakan pengawasan terhadap kegiatan para imigran serta melakukan sidak terkait identitas imigran

sudah dilakukan, tetapi memang untuk prosesnya tidak dapat dilakukan secara terus menerus dan intens, tetapi diluar sidak itu sendiri, pihak Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru tetap memberikan pengawasan baik dilapangan ataupun pengawasan yang sifatnya tidak langsung, seperti informasi yang didapat dari masing-masing rumah detensi yang ada di Kota Pekanbaru. Dan untuk jawaban pada kategori yang terakhir, tidak ada responden yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini, dimana kategori “Tidak Berperan”, dengan demikian, maka jawaban yang paling dominan dari keseluruhan pilihan di atas adalah jawaban dengan kategori “Cukup Berperan” dan selanjutnya penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari informan penulis dilapangan, baik dari pihak Kantor Imigrasi maupun Masyarakat.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas, dimana prosesnya melalui penyebaran kuesioner terhadap pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, selain dari sajian hasil penyebaran kuesioner di atas, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu bapak Oki Derajat Rizki Mubarak, yang menjabat selaku Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk membuktikan ke akuratan data yang di dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan masing-masing item penilaiannya, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, pengawasan yang dilakukan itu bentuknya berbeda-beda, dan itu sudah di jalankan semuanya, pengawasan dilapangan ini juga memiliki beberapa jenis pengawasan, bisa langsung kelapangan dengan melihat aktivitas mereka, atau langsung sidak rumah-rumah detensi, bisa langsung

sidak ke lokasi-lokasi tempat mereka di pusatkan, dan juga beberapa bentuk pengawasan lainnya, dan jadwal pengawasan yang kita tetapkan juga memiliki waktu yang berbeda-beda, khususnya pelaksanaan sidak, itu melihat situasi dan kondisi, apabila memang kita kira dibutuhkan sidak langsung untuk pembuktian sesuatu, maka proses sidak dilakukan pada saat itu juga” (Wawancara tanggal 08 Januari 2019, Oki Derajat Rizki Mubarak, Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru)

Untuk mencari tau pelaksanaan yang dilakukan dilapangan, penulis juga telah melakukan wawancara dengan perwakilan dari informan masyarakat yang penulis jumpai di sekitar tempat imigran melakukan aktivitas, dimana salah satunya adalah dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi MTQ Sudirman, yaitu Herik Kasino yang menjalankan usaha berdagang disekitar taman MTQ, informan penulis ini beraktivitas di lokasi tempat dimana imigran bebas melakukan aktivitasnya, dan adapun hasil wawancaranya adalah:

“Saya belum pernah melihat ada penertiban dari pihak Imigrasi Kota Pekanbaru, karna selama ini mereka cukup bebas bermain di kawasan MTQ, dan bahkan ada yang berjalan dan bersepeda sampai keliling kota Pekanbaru, karna mereka mungkin penasaran, jadi mencari taunya dengan bersepeda, dan untuk tempat tinggal, mereka tinggal di penampungan tidak jauh dari lokasi taman MTQ, tepatnya di belakang taman MTQ ini, makannya mereka banyak yang bermain di kawasan ini”. (Wawancara tanggal 10 Januari 2019, Herik Kasro, Pak RT 03)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang proses pengawasan secara langsung dan penindakan dengan melaksanakan sidak belum terlaksana dengan baik, dimana hal ini dibuktikan dari kondisi dilapangan dengan keberadaan para imigran yang bebas beraktivitas dan menjalankan kehidupannya layaknya masyarakat lokal, beberapa pantauan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa beberapa imigran ada yang beraktivitas dengan berkunjung ke Cafe, Gym, tempat Fitnes, Mal, dan

lokasi-lokasi lain yang berbentuk fasilitas umum seperti taman ruang terbuka hijau, dan kegiatan tersebut berlangsung dengan tanpa adanya tanda pengenal dari masing-masing imigran tersebut. Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian penulis pada indikator yang ke 2 (empat), dimana pembahasannya dapat dilihat dibawah ini.

4. Perbandingan Fakta dengan Standar

Langkah berikutnya adalah membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditentukan. Bila prestasi sesuai dengan standar, manajer akan menilai bahwa segala sesuatunya berada dalam kendali. Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang keempat yaitu tentang perbandingan fakta dengan standar maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Perbandingan Fakta dengan Standar

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Pelaksanaan Pembinaan terhadap Imigran	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	5 (100%)
2	Melakukan pendataan terhadap jumlah imigran	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5 (100%)
3	Keberadaan imigran sesuai dengan aturan	1 (20%)	4 (80%)	0 (0%)	5 (100%)
Jumlah		6	9	0	15
Rata-Rata		2	3	0	5
Persentase		40%	60%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.7 di atas dapat dilihat bahwa jawaban terhadap indikator keempat yang membahas tentang “Perbandingan Fakta dengan Standar” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Berperan” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 2 Orang responden dengan persentase (40%), hal ini dikarenakan pegawai Imigrasi menilai bahwa sudah melakukan pendataan dan pembinaan terhadap imigran yang ada di Kota Pekanbaru. Selanjutnya jawaban responden peserta pada kategori “Cukup Berperan” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 3 Orang responden peserta dengan persentase (60%). Alasan mereka memberikan jawaban cukup berperan ini adalah karena sebagian pegawai yang dijadikan sampel menyatakan bahwa pendataan pada imigran yang ada di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan, tetapi pada kendalanya adalah di dalam proses pembinaan yang dilakukan, hal ini dikarenakan perbedaan bahasa yang dimiliki masing-masing imigran tersebut, dimana imigran yang ada memiliki latar belakang Negara yang berbeda-beda pula. Sedangkan tanggapan pada kategori “Tidak Berperan” tidak ada responden yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas, dimana prosesnya melalui penyebaran kuesioner terhadap pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, selain dari sajian hasil penyebaran kuesioner di atas, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Oki Derajat Rizki Mubarak, yang menjabat selaku Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara

ini bertujuan untuk membuktikan ke akuratan data yang di dapatkan guna menyempurnakan penelitian penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan masing-masing item penilaian yang ada seperti “Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaksanaan Pendataan Terhadap Jumlah Imigran, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Sudah dilakukan, pendataan terkait dengan jumlah imigran atau pencari suaka yang ada di kota Pekanbaru sudah kita data secara keseluruhan dimana jumlah totalnya itu untuk tahun 2018 saja ada sebanyak 1.180 orang, dan jumlah ini sifatnya berubah-ubah sesuai dengan kedatangan dan jumlah mereka yang persi, karena mereka yang ada saat ini tidak menetap selama nya di Indonesia, ada yang hanya singgah dan nantinya akan melanjutkan perjalanan sampai ke benua Australia dan akan mencari suaka juga disana, jadi jumlah dari pencari suaka ini memiliki perubahan sesuai dengan data-data yang masuk dan yang pergi persetiap smesternya.” (Wawancara tanggal 08 Januari 2019, Oki Derajat Rizki Mubarak, Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru)

Dalam upaya penyempurnaan isi dari skripsi ini, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan responden masyarakat, dimana dalam hal ini di wakilkkan oleh beberapa orang yang penulis jadikan informan, diantaranya adalah Herik Kasro, yang merupakan Pak RT 03, adapun tanggapan mereka terhadap pertanyaan penulis terkait dengan pembahasan indikator yang ke 4 (empat) adalah sebagai berikut:

“Saya kurang tau untuk proses pembinaan apakah sudah dilakukan atau tidak, tetapi untuk jumlah yang ada di lokasi penampungan saat ini saya rasa mereka memiliki angka pastinya, karna tidak mungkin mereka tidak menghitung berapa jumlah manusia yang mereka tampung di rumah detensi tersebut.” (Wawancara tanggal 10 Januari 2019, Herik Kasro, masyarakat yang tinggal disekitar rumah penampungan imigran yaitu Pak RT 03)

Selain itu dengan informan yang sama yaitu dengan Pak RT 03, penulis juga menanyakan tentang apakah beliau pernah menanyakan kepada imigran apakah mereka ada kegiatan di dalam rumah detensi tersebut, berikut hasil wawancara peneliti dengan beliau:

“Saya pernah berbincang dengan salah satu imigran yang sudah bisa berbicara bahasa Indonesia, walaupun sedikit-sedikit, mereka mengakui kalau di dalam mereka diberikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keahlian mereka, hal itu dilakukan katanya supaya mereka memiliki aktivitas, khususnya untuk yang wanitanya, karna untuk wanita, mereka tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah detensi tanpa adanya izin dan pengawasan dari pihak rumah detensi.” (Wawancara tanggal 10 Januari 2019, Herik Kasro, masyarakat yang tinggal disekitar rumah penampungan imigran yaitu Pak RT 03)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pihak Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru sudah melakukan pendataan terhadap jumlah imigran atau pencari suaka yang ada di penampungan atau rumah-rumah detensi yang terbagi menjadi beberapa titik di Kota Pekanbaru, data-data yang telah penulis dapatkan juga telah penulis sajikan pada pembahasan di Bab I skripsi ini, dan untuk pembinaan, penulis juga telah melakukan observasi terhadap situasi yang terjadi dilapangan, dimana penulis mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan pembinaan memang sudah cukup dilaksanakan oleh pihak Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru. Dengan demikian maka pembahasan pada indikator yang ke 4 (empat) dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pendataan sudah cukup terlaksana dengan baik.

5. Tindakan Koreksi

Proses pengawasan tidak lengkap, jika tidak diambil tindakan untuk membetulkan penyimpangan yang terjadi. Karena di dalam suatu kegiatan pengawasan Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang kelima yaitu tentang tindakan koreksi maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Tindakan Koreksi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Pelaksanaan pemberian sanksi kepada imigran	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	5 (100%)
2	Pelaksanaan tindakan evaluasi terkait kinerja tim pengawas	1 (60%)	4 (40%)	0 (0%)	5 (100%)
3	Sanksi bagi imigran yang melakukan pelanggaran	1 (20%)	4 (80%)	0 (0%)	5 (100%)
Jumlah		4	11	0	15
Rata-Rata		1	4	0	5
Persentase		20%	80%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.8 di atas dapat dilihat bahwa jawaban terhadap indikator kelima yang membahas tentang “Tindakan Koreksi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Berperan” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 1 Orang responden dengan persentase (20%). Selanjutnya jawaban responden selanjutnya ada pada kategori “Cukup

Berperan” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 4 Orang responden, dengan persentase (80%). Alasan mereka memberikan jawaban cukup berperan ini adalah karena sebagian pegawai yang dijadikan sampel menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi tentunya sudah dilakukan setiap kali melaksanakan pengawasan di lapangan, tetapi jika untuk pemberian sanksi belum dilaksanakan secara tegas, lebih diberikan peringatan dan pembinaan. sedangkan tanggapan pada kategori “Tidak Berperan” tidak ada responden yang memberikan jawaban atau pilihan mereka terhadap kategori ini.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas, dimana prosesnya melalui penyebaran kuesioner terhadap pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, selain dari sajian hasil penyebaran kuesioner di atas, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Oki Derajat Rizki Mubarak, yang menjabat selaku Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk membuktikan ke akuratan data yang di dapatkan guna menyempurnakan penelitian penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan masing-masing item penilaian yang ada seperti “Pemberian Sanksi dan juga pelaksanaan tindakan evaluasi terkait kinerja dari tim yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Setiap tugas yang dijalankan dalam bentuk perintah tugas dari pimpinan, pasti dilakukan evaluasi dari hasil kinerja masing-masing

tim dan juga hasil keseluruhan dari proses atau pencapaian tim tersebut, hal tersebut tentunya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas kinerja anggota dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala-kendala dilapangan, ini berguna untuk proses pelaksanaan tugas di bidang yang sama dikemudian hari, jadi kita dapat mengetahui hal-hal apa yang perlu diperbaiki untuk tindakan selanjutnya. Saya pastikan setiap pelaksanaan tugas dilakukan tindakan evaluasi oleh pimpinan dari masing-masing bidangnya.” (Wawancara tanggal 08 Januari 2019, Oki Derajat Rizki Mubarak, Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru)

Pertanyaan penulis selanjutnya terkait dengan pemberian sanksi kepada imigran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya tentang ke imigrasian, dan untuk mengetahui jawaban tentang pertanyaan ini, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Oki Derajat Rizki Mubarak, yang menjabat selaku Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pemberian sanksi pasti ada, beberapa imigran juga sudah pernah kita berikan sanksi karna memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, dan khususnya adalah Negara Indonesia, karna mereka adalah warga Negara asing, jadi kedaulatan Negara harus dijaga dengan tegas, dan sanksi yang tinggi yang pernah kita berikan adalah mengembalikan imigran kenegara asalnya, hal ini memang dikarenakan beberapa hal dan pelanggarannya sudah dianggap cukup berat.” (Wawancara tanggal 08 Januari 2019, Oki Derajat Rizki Mubarak, Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru mengakui bahwa proses pemberian sanksi memang telah dilaksanakan, tetapi fakta yang penulis dapatkan dari hasil observasi dilapangan, penulis melihat

banyak para imigran yang dengan bebas beraktivitas tanpa adanya tanda pengenal untuk membedakan warga Negara asing dan juga warga Negara Indonesia pada umumnya yang tinggal di Kota Pekanbaru, hal ini tentunya dapat menimbulkan hal-hal yang berdampak kepada ketertiban dan kehidupan sosial lainnya. Contoh yang dapat penulis berikan adalah keberadaan para imigran yang beraktivitas di Gym “Bintang Laga” di daerah Simpang 3 Jalan Utama/Tengku Bay, para imigran melakukan aktivitasnya hingga malam hari untuk fitness dan aktivitas lainnya. Hal ini membuktikan bahwa adanya pembiaran dari pihak-pihak tertentu khususnya rumah detensi yang menjadi tempat penampungan dari para imigran tersebut.

Setelah seluruh hasil penelitian pada masing-masing indikatornya di dapatkan, penulis akan menyajikan hasil rekapitulasi dari masing-masing indikator untuk mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan dari penulisan skripsi ini, dimana untuk melihat hasil rekapitulasi tersebut, dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini.

C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden terkait dengan Penelitian Yang Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru

Adapun hasil rekapitulasi pada penelitian ini adalah untuk menyimpulkan keseluruhan jawaban yang telah di dapatkan dari penyebaran kuesioner penulis kepada responden pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi kota Pekanbaru, dimana hasil dari rekapitulasi ini dapat dijadikan kesimpulan untuk hasil skripsi penulis. dan adapun hasil rekapitulasinya adalah berikut:

Tabel V.9 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Penelitian Yang Membahas Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru.

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Menyusun Tujuan	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5 (100%)
2	Penetapan Standar	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	5 (100%)
3	Pengukuran Hasil Kinerja	1 (20%)	4 (80%)	0 (0%)	5 (100%)
4	Perbandingan Fakta dengan Standar	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	5 (100%)
5	Tindakan Koreksi	1 (20%)	4 (80%)	0 (35%)	5 (100%)
Jumlah		9	16	0	25
Rata-Rata		2	3	0	5
Persentase		40%	60%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.9 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden masyarakat dari keseluruhan sampel yang ada pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Menyusun Tujuan, Penetapan Standar, Pengukuran Hasil Kinerja, Perbandingan Fakta dan Standar, Tindakan Koreksi”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden masyarakat yang ada disekitar pabrik karet pada kategori

jawaban “Cukup Berperan” dengan total rata-rata dari keseluruhan jumlah rata-rata responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 3 orang atau jika di presentasikan mencapai jumlah 60% dan hasil tersebut adalah dari total keseluruhan jumlah responden atau dimana persentasenya mencapai angka 100% Responden pegawai Imigrasi yang menjadi sampel.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapat di atas, maka jawaban atas hipotesis yang telah penulis buat pada penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Peranan dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap imigran di Kota Pekanbaru ternyata cukup berperan, dimana jawaban ini berbeda dengan hipotesis awal yang penulis tetapkan yaitu belum berperannya pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam pelaksanaan pengawasan imigran atau pencari suaka di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka hipotesis yang penulis tetapkan di awal penelitian sudah mendapatkan jawabannya yaitu “Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru Cukup Berperan”

D. Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Imigrasi Kota Pekanbaru Dengan Judul Tentang Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan proses pengawasan terhadap imigran atau para pencari suaka yang berasal dari Negara lain di kota Pekanbaru, tentunya pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru memiliki beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam menjalankan proses tersebut, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Imigrasi

Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru, maka penulis akan menyajikan fakta dilapangan yang dihadapi oleh mereka, dimana kendala-kendala tersebut:

1. Berdasarkan pengakuan dari Oki Derajat Rizki Mubarak, yang menjabat selaku Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru, kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang harus melakukan pengawasan disetiap saat, karna pada dasarnya, para imigran tidak mungkin di isolasi di ruangan sepanjang hari, mereka diberikan ruang untuk beraktivitas di dalam kota dan lokasi tertentu.
2. Kendala selanjutnya adalah situasi dilapangan yang mana pada kenyataannya banyak masyarakat lokal yang berinteraksi dengan para imigran atau pencari suaka, sehingga jangkauan dari para imigran atau pencari suaka semakin luas dan beberapa kejadian, tidak terkontrolnya para imigran justru karena pengaruh dari masyarakat lokal.
3. Lamanya proses pemindahan para imigran atau pencari suaka ke Negara tujuan mereka, sehingga jumlah mereka semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karna pada dasarnya, Indonesia merupakan Negara singgah baru imigran atau pencari suaka sebelum mereka melanjutkan perjalanan kenegara tujuan seperti Australia.
4. Faktor bahasa yang berbeda menjadi kendala dari proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh asal muasal dari masing-masing imigran berbeda-beda Negara, sehingga tidak bisa disatukan dalam memberikan sosialisasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian maupun hasil dari wawancara. Maka kesimpulan secara keseluruhan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian ini adalah berada pada jawaban dengan kategori “Cukup Berperan”. Pelaksanaan pengawasan yang terjadi dilapangan belum terlaksana secara maksimal, hal ini tentunya dapat dibuktikan dari hasil observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa masing banyak imigran yang beraktivitas di tempat-tempat umum dikota Pekanbaru khususnya tempat-tempat ruang publik, selain itu, pengamatan penulis melihat fakta dilapangan bahwa aktivitas imigran atau pencari suaka di kota Pekanbaru juga tidak terbatas sampai di ruang publik saja, melainkan telah sampai kepada tempat-tempat seperti Gym “Bintang Laga” yang berada di daerah Simpang 3 Jalan Utama/Tengku Bay, para imigran ini melakukan aktivitasnya hingga malam hari untuk fitness dan aktivitas lainnya. Bahkan para imigran tersebut juga dapat mengunjungi mal-mal yang ada di kota Pekanbaru, Hal ini membuktikan bahwa adanya pembiaran dari pihak-pihak tertentu khususnya rumah detensi yang menjadi tempat penampungan dari para imigran tersebut.

Dalam melaksanakan proses pengawasan terhadap imigran atau para pencari suaka yang berasal dari Negara lain di kota Pekanbaru, tentunya pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru memiliki beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam menjalankan proses tersebut, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru, maka penulis akan menyajikan fakta dilapangan yang dihadapi oleh mereka, dimana kendala-kendala tersebut adalah:

5. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang harus melakukan pengawasan disetiap saat, karna pada dasarnya, para imigran tidak mungkin di isolasi di ruangan sepanjang hari, mereka diberikan ruang untuk beraktivitas di dalam kota dan lokasi tertentu.
6. Banyak masyarakat lokal yang berinteraksi dengan para imigran atau pencari suaka, sehingga jangkauan dari para imigran atau pencari suaka semakin luas dan beberapa kejadian, tidak terkontrolnya para imigran justru karena pengaruh dari masyarakat lokal.
7. Lamanya proses pemindahan para imigran atau pencari suaka ke Negara tujuan mereka, sehingga jumlah mereka semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karna pada dasarnya, Indonesia merupakan Negara singgah baru imigran atau pencari suaka sebelum mereka melanjutkan perjalanan kenegara tujuan seperti Australia.
8. Faktor bahasa yang berbeda menjadi kendala dari proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh asal muasal dari masing-masing imigran berbeda-beda Negara, sehingga tidak bisa disatukan dalam memberikan sosialisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak seperti pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru dan juga Masyarakat yang penulis jadikan *key informan* dalam penelitian ini, dengan adanya saran ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait untuk menjalankan proses pengawasan dengan mengetahui observasi yang berhasil penulis lakukan dan temukan dilapangan. Dan adapun saran-saran yang ingin penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah penulis disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menyarankan kepada pihak-pihak pegawai atau terkait yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru untuk lebih memaksimalkan pengawasan terhadap imigran atau pencari suka di Kota Pekanbaru, hal ini tentunya untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh para imigran atau pencari suka tersebut.
2. Selain dari pengawasan yang dilakukan, penulis berharap pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru memberikan tanda pengenal kepada setiap imigran atau pencari suka apabila memang mereka di izinkan untuk beraktivitas di tengah masyarakat atau di tempat-tempat ruang publik di daerah Kota Pekanbaru.

3. Proses pengawasan yang dilakukan seharusnya di terapkan bersamaan dengan pemberian sanksi, hal ini untuk memberikan efek jera kepada para imigran dan pencari suaka supaya mereka memberikan rasa hormat kepada hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
4. Penulis menyarankan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kota Pekanbaru agar menambah anggota atau tim kerjanya untuk melakukan pengawasan dilapangan, dan disarankan agar melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak kepolisian atau satpol PP kota Pekanbaru untuk menjalankan proses pengawasan secara bersamaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Brantas. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Dessler. Gary. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. buku 1. Jakarta: Indeks
- Ernie Tisnawati, Kurniawan Saefullah, 2005 “*Pengantar Manajemen*”, Murai Kencana, Jakarta.
- Griffin, 2004. *Komitmen Organisasi, Terjemahan*, Jakarta: Erlangga
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen, Cetakan Keduapuluh*, Yogyakarta, Penerbit BPEE
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Harahap, Sofyan Syafri, 2001. *Budgeting Penganggaran: Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen. Edisi Pertama, Cetakan Kedua*, PT Indah Karya (Persero) Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Penerbit Pustaka Quantum
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media: Yogyakarta
- Maringan, Masry S. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miftah Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implementasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhadam Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Musanef. 1982. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT.Gunung Agung.
- _____. 2002, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jilid Kedua, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Nawawi, Hadari, 1989. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta : PT. Haji Mas Agung
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineke Cipta

- _____. 2003. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta
- Raho Bernard. 2007, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.
- Rasyid, Ryaas. 2007. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Yasrif Watampone. Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siagian, P. Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*, Jakarta. Bumi Askara. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi*, Jakarta. Bumi Askara
- Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Mandar Maju
- Siswanto, Sastrohadiwiryono. 2008. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- _____.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafi'ie, Kencana, Inu, DR. 2005. *Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta*. Jawa Barat
- _____. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat
- Veitzal Rivai, 2004, *Manajer Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama*, Karta, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persadar.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Zulkifli, 2009. *fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru. UIR Press.

Dokumentasi :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2010 tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.